EVALUASI STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

SKRIPSI



Oleh:

<u>Salma Ulfa Nafi'ah</u> NIM. 18.12.11.178

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2022

EVALUASI STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

SKRIPSI

Diajukan kepada
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
Jurusan Dakwah dan Komunikasi
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Oleh : Salma Ulfa Nafi'ah NIM. 18.12.11.178

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2022

ENY SUSILOWATI, S.Sos., M.Si. DOSEN JUR. KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM UNIVERSITAS RADEN MAS SAID SURAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdri, Salma Ulfa Nafi'ah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

Universitas Raden Mas Said Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama

: Salma Ulfa Nafi'ah

NIM

: 181211178

Judul

: Evaluasi Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota

Surakarta Dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Dengan ini kami menilai skripsi tersebut dapat disetujui untuk diajukan pada Sidang Munaqosyah Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 08 Desember 2022 Pembimbing,

Eny Susilowati, S.Sos., M.Si. NIP. 19720428 200003 2 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Salma Ulfa Nafi'ah

NIM

:181211178

Tempat, Tanggal Lahir

: Surakarta, 04 Desember 1999

Program Studi

: Komunikasi dan Penyiaran Islam

Jurusan

: Dakwah dan Komunikasi

Fakultas

: Ushuluddin dan Dakwah

Alamat

: Sogaten, Jl. Kencur Selatan I No.8B, Pajang,

laweyan, Surakarta.

Judul Skripsi

: Evaluasi Strategi Komunikasi Humas Pemkot

Surakarta dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi iuni benar adalah hasil karya sendiri, jika dikemudian hari terbukri bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagiuan atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hokum.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagiamana mestinya.

Surakarta, 07 Desember 2022 Penulis

> <u>Salma Ulfa Nafi'ah</u> NIM. 18.12.11.178

HALAMAN PENGESAHAN

EVALUASI STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS PEMKOT SURAKARTA DALAM PENANGANAN COVID-19

Disusun Oleh:

Salma Ulfa Nafi'ah

NIM: 131211178

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Pada Hari Rabu, 21 Desember 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Sosial (S.Sos)

Surakarta, 26 Desember 2022

Penguji Utama

Fathan, S.Sos., M.Si.

NIP. 19690208 199903 1 001

Penguji II/Ketua Sidang

Penguji I/ Sekretaris Sidang

Eny Susilowati, S.Sos., M.Si

NIP. 19720428 200003 2 002

Rhesa Zuhriya BP., M.I.Kom

NIP. 19920203 201903 2 000

Mengetahui,

os Ushuluddin dan Dakwah

VIP: 19730522 200312 1 001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi rabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya serta pada kesempatan kali ini saya telah menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan kepada semua orang. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Kedua Orang Tua saya, Bapak Medi Luhur Purwanto dan Ibu Sri Widatiningsih
- Kakak dan Adik saya, Kakak saya Farah Afifa Mucharima, dan adik saya Hasna Ukhti Luthfia
- 3. Seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan doadoa terbaiknya
- 4. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Surakarta, Kepala Bagian Dokumentasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Surakarta, dan staff Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Surakarta.
- Lutfia Defita Fajrin, Atika Pratiwi, Melinda Alamsyah, Aisyah Nur Cahyanti, Adis Saputri, Qorin Dururi Hamid.
- 6. Teman-teman kronk yang saya cintai dan saya banggakan dan sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

MOTTO

"Teruslah berjalan dan lewati lubang hingga mencapai tujuanmu. Meski terjatuh, jangan lengah. tetap berdiri meskipun kakimu tertatih"

ABSTRAK

SALMA ULFA NAFI'AH. NIM 181211178. Evaluasi Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Surakarta dalam Penanganan Covid-19. Skripsi. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah. Universitas Islam Negri Raden Mas Said Surakarta 2022.

Covid-19 mulai melanda Indonesia dengan kasus pertama yang muncul pada bulan maret 2020 silam. Dikarenakan Indonesia berada pada jalur lintas internasional yang merupakan jalur maritim dunia, Indonesia menjadi rentan terhadap ancaman penyakit yang dibawa oleh makanan, binatang, maupun mobilitas manusia dikarenakan dampak lalu lintas global. Pemerintah Indonesia termasuk Pemerintah Kota Surakarta berupaya dalam melakukan pencegahan kasus Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan Surat Edaran Walikota yang terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan kondisi pandemi hingga saat ini. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi strategi humas pemerintah Kota Surakarta dalam penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan teori audit komunikasi mikro.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung dengan pihak terkait. Keabsahan data pada penelitian ini ditentukan menggunakan teknik triangulasi sumber. Sedangkan, teknik analisis data menggunakan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi serta pengesahan kesimpulan.

Hasil evaluasi penelitian yang dilakukan pada proses memahami tujuan dan hakekat komunikasi yang dilakukan humas Pemerintah Kota Surakarta secara garis besar sudah sesuai dengan tujuan Komunikasi Lembaga, yaitu melaksanakan kegiatan komunikasi publik terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Selanjutnya, audit humas pada proses penentukan rancangan dan prosedur sudah sesuai dengan tujuan awal yang berpedoman pada keputusan Walikota Surakarta Nomor 443.05/99.2 tahun 2020. Sedangkan, audit humas pada proses menetapkan petunjuk pelaksanaan kurang sesuai dengan Tujuan komunikasi strategi yaitu pada Komunikasi lembaga pada penetapan strategi pada gelombang pertama, Sedangkan gelombang kedua dan ketiga sesuai dengan indikator keberhasilannya dan tujuan komunikasi yaitu masyarakat sudah teredukasi dan mengetahui informasi mengenai pembaharuan kebijakan yang diperbaharuii sesuai dengan situasi dan kondisi Covid-19 di Kota Surakarta.

Kata Kunci : Evaluasi Strategi, Penanganan Covid-19, Humas Pemerintah Kota Surakarta

ABSTRACT

SALMA ULFA NAFI'AH. NIM 181211178. Evaluation of the Public Relations Communication Strategy of the Surakarta City Government in Handling Covid-19. Thesis. Islamic Communication and Broadcasting Study Program. Ushuluddin and Da'wah Faculty. Raden Mas Said State Islamic University Surakarta 2022.

Covid-19 began to hit Indonesia with the first case appearing in March 2020. Because Indonesia is on an international route which is a world maritime route, Indonesia is vulnerable to the threat of diseases carried by food, animals, and human mobility due to the impact of global traffic. The Indonesian government, including the Surakarta City Government, is trying to prevent the Covid-19 case by issuing a Mayor's Circular Letter which is continuously updated in accordance with developments in the current pandemic conditions. This research was conducted with the aim of describing evaluate the public relations strategy of the Surakarta city government in handling Covid-19 by using micro communication audit theory.

This study uses a qualitative descriptive research method. Data collection techniques are observation, interviews, and direct documentation with related parties. The validity of the data in this study was determined using source triangulation techniques. Meanwhile, data analysis techniques used methods of data collection, data reduction, data presentation, also verification and validation of conclusions.

The results of the evaluation of the research conducted on the process of understanding the purpose and nature of communication carried out by the Public Relations of the Surakarta City government, in general are in accordance with the objectives of the communications Institution, namely carrying out public communication activities related to the prevention and control of Covid-19. Furthermore, the public relations audit in the process of determining the design and procedures was in accordance with the initial objectives which were guided by the Decree of the Mayor of Surakarta Number 443.05/99.2 of 2020. Meanwhile, the public relations audit in the process of establishing implementation guidelines was not accordance with the indicators of success of the strategic communication, namely the institutional communication on strategy determination in the first wave, for the second and third are quite effective with indicators of success, namely that the public has been educated and knows information about policy reforms which are updated according to the situation and conditions of Covid-19 in the City of Surakarta.

Keywords: Strategy Evaluation, Handling of Covid-19, Surakarta City Government Public Relation.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi robila'lamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : "Evaluasi Strategi Komunikasi Humas Pemkot Surakarta dalam Penanganan Covid-19" dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya.

Skripsi ini disusun dan berguna untuk memenuhi syarat dalammenyelesaikan program sarjana (S1) serta untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Penulis menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik tidak luput peran dan dukungan dari berbagai pubah. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
- 2. Dr. Islah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta.
- 3. Abraham Zakky Zulhazmi, M.A. Hum. Selaku Koordinator Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.
- 4. Eny Susilowati S.Sos, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan kesempatan serta meluangkan waktunya untuk memberikanbimbingan serta motivasi kepada penulis selama menempuh kuliah hingga menyelesaikan kuliah.
- Fathan.S.Sos., M.Si selaku Dosen Penguji utama, Rhesa Zuhriya B.P. M.I.Kom selaku Dosen Penguji I, yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta saran kritiknya untuk perbaikan penulis, dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Seluruh Dosen Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis dan para

staf Akademik FUD yang membantu dalam pengurusan prosedur mulai dari ujian seminar hingga munaqosyah.

7. Wahyu Kristina, SS. MM., Suroso, S.I.P, dan Novriyan Panji. S.I.Kom yang telah memberikan bantuan berupa informasi serta meluangkan waktunya untuk penelitian ini.

8. Kedua Orang tua penulis, Bapak Medi Luhur Purwanto, dan Ibu Sri Widatiningsih serta kakak dan adik saya. Terima kasih atas seluruh dukungan, kesabaran, pengorbanan dan doa-doa terbaiknya untuk penulis.

9. Lutfia Defita Fajrin, Atika Pratiwi, Melinda Alamsyah, Aisyah Nur Cahyanti, Adis Saputri, Qorin Dururi Hamid, Nabilla Rachma, dan Temanteman Kronk yang telah menemani penulis menyelesaikan penelitian ini.

10. Teman-teman KPI Angkatan 18 UIN Raden Mas Said Surakarta yang selalu memberikan saya motivasi, semangat dan doanya.

11. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dan doanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Terima Kasih Penulis ucapkan, atas bantuan, bimbingan dan dukungan serta doanya, semoga menjadi amal baik. Penulis menyadari banyak terdapat kesalahan serta keterbatasan dalam skripsi ini.

Surakarta, Penulis

Salma Ulfa Nafi'ah NIM. 18.12.11.178

DAFTAR ISI

HALA	MAN JUDULi	
HALA	MAN NOTA PEMBIMBINGii	
SURAT	PERNYATAAN KEASILAN SKRIPSiii	
HALA	MAN PENGESAHANiv	
HALA	MAN PERSEMBAHANv	
MOTT	O vi	
ABSTR	2AKvii	
ABSTR	ACTviii	
KATA	PENGANTARix	
DAFTAR ISIxi		
BAB I I	PENDAHULUAN1	
A.	Latar Belakang Masalah 1	
В.	Identifikasi Masalah9	
С.	Rumusan Masalah9	
D.	Pembatasan Masalah10	
E.	Tujuan Penelitian 10	
F.	Manfaat Penelitian10	
BAB II	LANDASAN TEORI 12	
A.	Kajian Teori 12	
1.	Konsep Hubungan Masyarakat 12	
2.	Komunikasi Organisasi18	
3.	Strategi Komunikasi Humas 21	
4.	Evaluasi Strategi (Audit Komunikasi Kehumasan)	

5.	Covid-19 3	1
В.	Kajian Pustaka3	3
С.	Kerangka Berpikir3	6
BAB III	I METODE PENELITIAN 3	8
A.	Jenis Penelitian	8
В.	Tempat dan Waktu Penelitian 3	8
С.	Sumber Data	9
D.	Subjek dan Objek Penelitian 4	0
E.	Teknik Pengumpulan Data 4	1
F.	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 4	2
G.	Teknik Analisis Data 4	3
BAB IV	HASIL PENELITIAN4	6
A.	Gambaran Umum4	6
В.	Sajian Data5	6
C.	Analisis Hasil Penelitian	2
BAB IV	PENUTUP 10	8
A.	Kesimpulan 10	8
В.	Saran	9
DAFTA	R PUSTAKA11	0
LAMPI	RAN11	3

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Covid-19 mulai melanda di Indonesia dengan kasus pertama muncul pada Maret 2020 silam. Hingga tahun 2022 kasus tersebut mewabah hingga enam juta kasus per Mei 2022 (dikutip dari : Beranda | Covid19.go.id). Pada awal kemunculan Covid-19, banyak masyarakat yang berasumsi bahwa Covid-19 muncul disebabkan karena adanya masyarakat yang mengkonsumsi makanan hewani yang tidak lazim seperti ular, monyet, maupun kelelawar. Faktanya, hingga kini kemunculan virus tersebut belum juga diketahui penyebabnya.

Letak geografis Indonesia berada pada jalur lintas internasional, yang merupakan jalur maritim dunia. Maka, Indonesia rentan terhadap keluar masuknya penyakit yang dibawa oleh makanan, binatang, maupun mobilitas manusia dikarenakan dampak lalu lintas global. WHO (World Health Organisation) telah mengkategorikan Covid-19 sebagai pandemi. Pandemi Covid-19 bukan satu-satunya kasus pandemi yang pernah terjadi di Indonesia maupun dunia. Salah satu kasus pandemi yang mewabah di dunia yaitu wabah pes yang disebabkan oleh bakteri Yersinia Pestis. Penularan wabah tersebut terjadi melalui kutu pinjal pada tikus. Wabah tersebut merupakan pandemi mematikan yang dikenal dengan sebutan Black Death. Selain wabah pes, wabah flu spanyol (Influenza Pandemic) yang terjadi pada tahun 1919 juga mewabah di dunia, pandemi tersebut menginfeksi hampir 500 juta jiwa atau

sekitar setengah populasi dunia pada saat itu dan angka kematian (*fatality rate*) yang dikarenakan virus tersebut mencapai 50 juta jiwa. Hal ini dikarenakan *fatality rate* yang diakibatkan oleh pandemi flu spanyol mencapai 10% dari total kasus yang terjadi. Penanganan Pandemi Flu Spanyol berkontribusi terhadap sistem penanganan Pandemi Covid-19 saat ini.

Pemerintah Indonesia juga berupaya melakukan pencegahan kasus Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan yang pertama pada tanggal 17 April 2020. Presiden mengumumkan virus Covid-19 sebagai bencana nasional melalui KEPPRES No. 12 Tahun 2020 dan KEPPRES No. 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019, serta PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam angka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019. Dikarenakan dikeluarkannya Kepres tersebut maka setiap daerah wajib melakukan penanggulangan virus Covid-19.

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi di Indonesia ketiga yang paling terdampak oleh adanya Covid-19 dan Kota Surakarta merupakan kota dengan kasus terbanyak di daerah Solo Raya. Kota Surakarta merupakan kota besar dan memiliki mobilitas kota yang tinggi diantara kota-kota di Solo Raya lainnya. Hal tersebut menyebabkan tingginya kasus virus Covid-19 terus meningkat. Selain itu, terdapat beberapa faktor penghambat upaya Pemerintah Kota Surakartadalam menangani virus Covid-19. Salah satunya yaitu banyaknya penduduk dan beragamnya latar belakang masyarakat di

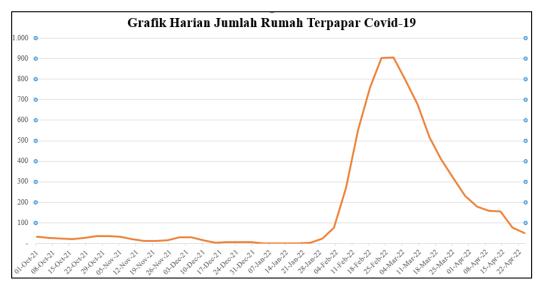
Kota Surakarta yang menyebabkan penyebaran informasi dan edukasi mengenai Virus Covid-19 tidak merata masuk ke seluruh lapisan masyarakat Sehingga ada masyarakat yang mematuhi peraturan dan himbauan yang berlaku, namun juga banyak yang menyepelekan mengenai virus Covid-19. Hal ini menyebabkan tingginya ketidakpatuhan masyarakat mengenai penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) di beberapa daerah. Dikutip dari berita online Solopos.com warga Jebres menepati urutan terakhir dalam hal menjaga kepatuhan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak dan menghindari kerumunan dengan presentase sebesar 72,55%, sementara pemakaian masker sebesar 86,21%.

Pemerintah Kota Surakartamengeluarkan kebijakan dalam penanggulangan virus Covid-19 melalui Surat Edaran Walikota yang akan terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan kondisi pandemi setiap saat hingga saat ini. Kebijakan tersebut merupakan tanggungjawab besar bagi seorang pimpinan daerah. Maka, dibutuhkan strategi yang tepat untuk menerapkan dan merealisasikan kebijakan tersebut agar masyarakat Kota Surakarta patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan sehingga tingkat penyebaran Covid-19 dapat ditekan.

Pemerintah Kota Surakartamemerlukan konsep humas pemerintahan dalam penerapan strategi dalam upaya penanganan Covid-19. Humas pemerintahan memiliki peran penting yaitu sebagai penghubung antara lembaga pemerintahan dengan masyarakat. Humas pemerintahan juga berperan dalam menyampaikan suatu informasi kepada khalayak masyarakat,

selain tugas utamanya dalam menyebarkan aktivitas instasi baik antar pegawai pemerintahan dan kepada masyarakat sekitar. Humas pemerintahan juga harus pandai dalam mengatur dan mengetahui ketika krisis sedang terjadi pada lembaga pemerintahan tersebut.

Humas Pemerintah Kota Surakartaatau Prokompim (Protokol dan Komunikasi Pimpinan) Sekretariatan Daerah Kota Surakarta berperan penting dalam penerapan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta, sehingga penting adanya penerapan kebijakan yang efisien dan tepat dalam penanganan pandemi Covid-19. Humas Pemerintah Kota Surakartamemiliki strategi dalam membantu Pemerintah Kota Surakartadalam menangani Covid-19 pada dua tahun terakhir ini yaitu dengan menyebarkan Surat Edaran Walikota serta memberikan saran dan masukan kepada walikota Surakarta sebelum menetapkan sebuah Surat Edaran Walikota. Strategi Komunikasi humas dalam menerapkan kebijakan pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 tidak dapat dikatakan semuanya berhasil atau efektif dalam pengaplikasiannya kepada masyarakat. Dampak dari ketidakefektifan strategi humas dapat dilihat pada Gambar I. 1. Pada Gambar I. 1 terlihat terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang sangat signifikan mulai tanggal akhir Januari 2022 dan puncaknya terjadi pada akhir bulan Februari 2022. Penurunan kasus Covid-19 terjadi mulai pertengahan Maret 2022 dan mulai menjadi stabil pada akhir April 2022.



Gambar I. 1 Grafik harian jumlah rumah terpapar Covid-19 di Kota Surakarta (sumber: https://covid.intip.surakarta.go.id)

Surat Edaran Nomor 067/4061 yang dikeluarkan pada tanggal 16 November 2021 menjelaskan tentang kriteria level situasi pandemi Kota Surakarta yang berada pada Level 2 (insiden komunitas yang rendah). Meskipun demikian tetap diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi. PPKM diberlakukan dengan melaksanakan tatanan dan adaptasi kebiasaan baru (*New Normal*), melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada uji coba pembukaan Usaha Pariwisata Taman Rekreasi di daerah dengan status PPKM level 3 pada wilayah Jawa dan Bali. Namun, seperti terlihat pada Gambar I. 1 pada Januari 2022 terjadi lonjakan Covid-19 gelombang ke tiga, dikarenakan sejak dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 067/4061 pada bulan November 2021 tidak ada lagi pembaharuan kebijakan untuk membatasi masyarakat yang berpergian pada tahun baru dan perayaan hari natal 2021.

Dengan adanya lonjakan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surakartakurang sigap dalam mengantisipasi kemungkinan lonjakan kasus Covid-19 pada libur panjang natal dan tahun baru tahun 2022. Lonjakan tersebut dapat dilihat pada Gambar I.1. Pemerintah kemudian mengeluarkan Surat Edaran Nomor KS.00.23/892/2022 pada tanggal 8 Maret 2022 yang merupakan pembaharuan dari Surat Edaran Walikota Nomor 067/4061 untuk menekan laju kasus Covid-19.

Humas Pemkot Surakarta memiliki wewenang menjadi jembatan antara pihak intern (lembaga dalam pemerintahan) dan pihak ekstern (masyarakat Kota Surakarta). Sedangkan pemerintah memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Surat Edaran Walikota untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. Berdasarkan Gambar I. 1. mulai terlihat lonjakan kasus Covid-19 pada akhir Januari 2022. Namun, hingga dua bulan berlalu, setelah lonjakan Covid-19 mulai turun, pemerintah baru mengeluarkan Surat Edaran Walikota pada 8 Maret 2022. Hal tersebut terjadi kemungkinan dikarenakan adanya sistem komunikasi antara humas Pemkot Surakarta dengan Walikota Surakarta yang kurang efektif dari Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Surakartadalam menangani Covid-19.

Dengan adanya masalah di atas, perlu adanya evaluasi komunikasi terkait pelaksanaan strategi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta seperti dalam menentukan khalayak, penyusunan pesan yang akan disampaikan kepada khalayak, menentukan tujuan komunikasi, dan menentukan media yang digunakan, dikarenakan peneliti hanya melakukan

kegiatan audit komunikasi pada salah satu program atau kegiatan komunikasi pada lembaga humas Pemerintah Kota Surakarta maka, peneliti hanya menggunakan teori audit komunikasi mikro untuk melihat sudah efektifkah komunikasi internal Pemkot Surakarta dalam menetapkan kebijakan pemerintah sekaligus mengantisipasi ancaman pandemi yang ada dimasa yang akan datang teori audit komunikasi digunakan karena untuk mendapatkan hasil evaluasi yang maksimal. Terjadinya kenaikan dan penurunan kasus Covid-19 dapat disebabkan beberapa faktor yaitu masyarakat yang tidak menaati kebijakan, adanya hari libur panjang nasional, dan kurang efektifnya kebijakan pemerintah. Humas yang berperan menjadi jembatan antara pihak ekstern-intern dari Pemkot Surakarta dalam menyebarkan, menerapkan kebijakan tersebut, dan memiliki wewenang untuk memberikan saran kepada Walikota sebelum menetapkan kebijakan, serta memastikan bahwa masyarakat menaati kebijakan pemerintah dalam menangani lonjakan Covid-19.

Penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam riset ini adalah penelitian dari Andhika (2021). Penelitian tersebut menjelaskan tentang Efektivitas komunikasi Risiko Covid-19 oleh Pemerintah.penelitian tersebut meneliti mengenai Efektifitas program pemerintah dalam komunikasi risiko Covid-19 menggunakan metode kuantitatif. dengan melibatkan 20.708 responden tokoh agama, masyarakat, dan pemerintahan yang tersebar di provinsi Jawa Timur, NTB, dan Bali. Pada penelitian ini dikatakan efektif atau tidak program pemerintah dilihat dari respon masyarakat yang diberikan

pertanyaan perihal Covid-19. Dalam data temuannya, Andhika menyimpulkan.

Pada poin ini kebaharuan dari riset yang akan penulis teliti adalah penulis akan melihat efektivitas komunikasi yang terjalin di dalam internal pemerintah dalam merencanakan, melaksakan, dan mengevaluasi komunikasi humas dalam membantu pemerintah dalam membantu penerapan kebijakan penanganan Covid-19. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan evaluasi pemkot.

Literasi selanjutnya yang dijadikan rujukan penulis yaitu penelitian dari Hestiana (2020) Mahasiswa Universitas Sebelas Maret, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Penelitian tersebut berjudul Strategi Komunikasi Humas Pemkot Surakarta Dalam Mengatasi Kesimpangsiuran Berita Krisis Pandemi Covid-19 di Kota Surakarta Pada Periode Maret 2020-Juni 2020. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai berita atau informasi yang belum pasti sehingga membuat masyarakat Kota Surakarta menjadi bingung dan panik dalam krisis pandemi Covid-19, sehingga membutuhkan informasi faktual dari pemerintah.

Covid-19 pada saat itu menjadi fenomena baru bagi masyarakat Indonesia sehingga terjadi *caos* dan menyebabkan banyak sekali informasi simpang siur beredar di tengah masyarakat, kebaharuan penelitian penulis yaitu mengenai keadaan pandemi Covid yang sudah berubah menjadi endemi sehingga peneliti mengevaluasi komunikasi dalam kinerja humas pemkot

surakarta dalam menekan pertumbuhan Covid-19 yang dimungkinkan akan terjadi.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam untuk mengevaluasi strategi komunikasi dari bagian Pemerintah Kota Surakartadalam situasi pandemi tersebut. maka penulis mengambil judul penelitian mengenai "EVALUASI STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19"

B. Identifikasi Masalah

Dari masalah diatas maka dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut:

- Adanya faktor penghambat dalam upaya Prokompim Kota Surakarta untuk menanggulangi Covid-19 seperti masyarakat yang kurang menaati kebijakan dalam hal protokol kesehatan.
- Kemungkinan adanya strategi komunikasi yang kurang efektif dalam penanggulangan Covid-19 pada humas Pemkot Surakarta.
- Adanya kinerja humas yang kurang efektif dalam penerapan kebijakan pemerintah di masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana Evaluasi Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Surakarta Dalam Penanganan Pandemi Covid-19?

D. Pembatasan Masalah

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini perlu dijelaskan, untuk memberi gambaran mengenai ruang lingkup penelitian dan menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman serta kekaburan penelitian.

Pertimbangan terlalu luasnya permasalahan yang diteliti, disamping keterbatasan waktu, dana dan tenaga yang tidak cukup untuk seluruh masalah di atas, maka dalam hal ini peneliti hanya akan meneliti tentang Evaluasi Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Surakarta Dalam Penanganan Pandemi Covid-19.

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik sebuah tujuan dari penelitian ini adalah

Mendeskripsikan Evaluasi Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Surakarta Dalam Penanganan Pandemi Covid-19.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan acuan pemikiran bagi pengembangan ilmu komunikasi dan khususnya terkait dengan kajian publik relation.

2. Manfaat praktis

a. Bagi mahasiswa diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan

bagi mahasiswa yang berminat dengan kajian strategi Komunikasi humas.

 Bagi lembaga pemerintahan diharapkan dapat membantu pihak pemerintah sebagai bahan evaluasi fenomena-fenomena serupa mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Konsep Hubungan Masyarakat

Pemahaman humas secara terminologi menurut Scott M.Cutlip, Akken H. Center, Glen M. Broom menjelaskan *public relation* adalah sebuah fungsi manajemen yang membentuk dan memelihara suatu relasi yang menguntungkan antara sebuah lembaga dengan publik (Sari & Nugrahani, 2019). Sedangkan menurut, Crystallizing public opinion adalah suatu bidang yang mengatur hubungan antara organisasi dengan khalayaknya yang menentukan kehidupan (Mardiyah & Salma, 2021).

a. Peranan dan Fungsi Humas

- 1) Humas memiliki konsep fungsional menurut Bertrand N. Canfield dalam bukunya yang berjudul "Public Relation: Principles and Problems", mengemukakan fungsi Humas sebagai berikut (Uchjana, 1998):
 - a) It Should serve the public's Interest (mengabdi kepada kepentingan umum)

Seorang humas memiliki tugas untuk kepentingan umum. Yang dimaksud kepentingan umum adalah publik internal perusahaan dan ekstenal perusahaan yang harus memiliki hubungan harmonis. Dalam pelaksanaannya humas harus memberukan argumentasi secara nalar yang dapat diterima oleh pihak

manajer. Sehingga manajer akan menyadari bahwa untuk membela kepentingan umum, kehumasan tidak selalu harus berada di pihak manajer demi terciptanya tujuan organisasi dibawah arahan manajer.

b) Maintain Good Communication (menjaga komunikasi yang baik)

Yang dimaksud dengan komunikasi yang baik ialah hubungan komunikatif antara humas dengan publik (interen-ekstern perusahaan) dilaksanakan secara timbal balik berlandaskan empati sehingga menimbulkan rasa simpati. Seorang humas tidak pernah memilah siapa yang harus di hormati atau di hargai. Dimata humas semua kedudukan sama yaitu sebagai insan atau manusia yang akan berhak dilayani.

c) Stress Good Morals and Manners (menitikberatkan pada moral dan perilaku yang baik)

Humas merupakan wakil daripada organisasi yang berhubungan dengan masyarakat, menjadi citra sebuah organisasi. Apabila humas memiliki sikap yang terpuji dan bermoral tinggi, maka masyarakat akan memandang bahwa organisasi tersebut memiliki citra yang baik, begitu pula sebaliknya. Dapat disimpulkan bahwa seorang humas merupakan *icon* dari perusahaan/organisasi.

- 2) Humas juga memiliki peranan yang merupakan sebuah kunci penting untuk memahami fungsi humas. Peranan Humas Menurut Cultip dan center didalam buku Rosady Ruslan di bagi menjadi Kategori dalam suatu organisasi:
 - a) Berperan sebagai *Communicator* (komunikator): seorang ahli *public relation* yang berperan sebagai penghubung antar organisasi yang diwakili oleh publiknya. Maksudnya humas berperan sebagai wakil dari sebuah perusahaan sebagai jembatan berhubungan dengan public (internak dan eksternal perusahaan).
 - b) Sebagai pembina relationship: public relation bertindak sebagai seorang Pembina atau yang berupaya membina hubungan baik dan pengertian yang menguntungkan dengan pihak publiknya. Maksudnya, dalam hal ini humas berperan untuk melakukan pendekatan yang baik dengan public.
 - c) Peranan *Back up management :* seorang humas yang memiliki peran sebagai pendukung dalam fungsi manajeensebuah lembaga atau organisasi. Humas sebagai pendukung sebuah organisasi harus selalu sigap dalam menjalankan tugas yang diberikan dari seorang manager perusahaan atau pimpinan lembaga.
 - d) Berperan dalam membentuk *Corporate Image:* peran humas yang terakhir yaitu berupaya menciptakan citra yang baik bagi peruahaan atau lembaga. Humas berperan untuk menjaga dan

menciptakan citra yang positif sehingga perusahaan mendapatkan pengertian yang baik dari publik atau khalayak.(Ruslan, 2008)

b. Konsep Humas Pemerintahan

Lembaga-lembaga pemerintahan dilengkapi dengan bidang Humas, karena dianggap penting. Falsafah negara yang berbunyi dari rakat, oleh rakyat untuk rakyat yang dianut oleh beberapa negara demokrasi membuat pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu kewajiban yang utama. Rakyat ikut mengawasi kinerja pemerintah dalam pelaksanaannya menjalankan tugas kenegaraan, apabila tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, maka masyarakat berhak untuk mengkritiknya. Bidang kehumasan di pemerintah pusat maupun daerah bertugas sebagai pengelola informasi dan opini public. Humas berperan sebagai penyebar luas informasi kebijakan pemerintah, dan menampung opini public yang kemudian dikaji untuk menetapkan kebijakan berikutnya.

Sam Black dalam bukunya yang berjudul "Practical Public Relation" mengklasifikasikan humas menjadi sebagai berikut:

1) Hubungan Masyarakat pemerintah Pusat

Humas memiliki kedudukan yang cukup tinggi di departemen pemerintahan, pada departemen tersebut humas memiliki keleluasaan dalam memberikan wewenang dan fungsi sebagai penasehat pimpinan departemen, pada pertemuan seluruh tingkat kementrian. Humas diberikan kepercayaan penuh oleh para Menteri dan tidak dapat melaksanakan tugasnya tanpa keleluasaan memperoleh informasi yang lengkap.

Humas memiliki dua tugas kehumasan, yaitu: (1) menyebarkan informasi secara mengenai kebijakan, perencanaan dan hasil yang telah dicapai pemerintah, dan (2) menjelaskan kepada publik mengenai kebijakan atau undang-undang yang berhubungan dengan kehidupan rakyat. (Uchjana, 1998)

2) Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah

Humas pemerintah daerah pada hakikatnya hampir sama dengan humas pemerintah pusat dalam pengorganisasian dan mekanisme kerja. Perbedaan antara humas pemerintah daerah dengan humas pemerintah pusa hanya terdapat pada ruang lingkupnya saja. Bagi negara Indonesia yang memiliki norma beragam, suku bangsa yang bermacam-macam, dan dengan jumlah penduduk yang tersebar di berbagai pulau. Bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten tertentu diperlukan bagian khusus. yang terpenting tercapainya tujuan humas dan terlaksananya fungsi humas di daerah tersebut.

Menurut Sam Black dalam bukunya yang sama menjelaskan empat tujuan utama pemerintah daerah, yaitu:

- a) Memberikan atau menyebarkan informasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui kebijakan lembaga serta kegiatan seharihari
- b) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan saran mengenai pandangan mengenai proyek (program kerja) yang penting sebelum lembaga menetapkan keputusannya.

- c) Menerangkan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan system pemerintahan daerah dan menjelaskan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban.
- d) Menanamkan rasa cinta tanah air (civic Pride)

Dalam pelaksanaan tiap daerah tentu berbeda tergantung dengan ruang lingkup, dan ciri khas masyarakatnya. Pada contoh humas di ibukota akan berbeda dengan lingkup kabupaten atau kota madya. Perbedaan fasilitas dan media massa baik cetak maupun elektronik sebagai fasilitas publikasi mempengaruhi kinerja humas. Pada tingkat kabupaten tidak terdapat media massa, maka penyebaran informasinya dilakukan dengan media nirmassa seperti poster, spanduk, dll. Atau dilakukan secara langsung melalui sosialisasi dengan masyarakat baik dalam bentuk rapat umum atau *anjangsono* (kunjungan silaturahmi). (Uchjana, 1998)

Hal yang menyangkut pengorganisasian dan operasional humas pemerintah di Indonesia mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Dalam hal tersebut, depatemen penerangan yang bertugas mengadakan pembinaan. pembinaan pertama kali dilaksanakan pada tahun 1967 yang kemudian dibentuk Badan Kerja Sama (BKS) antara Humas-humas pemerintah terdapat pada departemen-departemen Kabinet Republik Indonesia, namun BKS dianggap kurang efektif dan sesuai dengan fungsinya. Pada tahun 1970 BKS dirubah menjadi Badan Koordinasi (BAKOR) Kehumasan Pemerintah, dan kemudia pada tahun 1971 nama badan tersebut diubah lagi dengan nama Bakohumas.

2. Komunikasi Organisasi

Pemahaman komunikasi organisasi ditinjau dari segi terminologi beberapa tokoh adalah sebagai berikut (Silviani, 2019):

- a. Menurut Wayne Pace dan Don F. menjelaskan mengenai fungsional organisasi sebagai kegiatan menafsirkan suatu pesan antar unit komunikasi dari suatu organisasi tertentu. suatu organisasi, terdiri dari unit komunikasi dalam hubungan hierarkis antar satu dengan yang lainnya dalam suatu lingkungan.
- b. Goldhaber juga mengemukakan bahwa komunikasi organisasi dapat dijelaskan dengan berbagai sudut pandang:
 - Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu sistem yang kompleks dan terbuka dan dipengaruhi oleh lingkungan internal maupun eksternal.
 - 2) Komunikasi organisasi melibatkan pesan, tujuan, media, dan arah.
 - Komunikasi organisasi melibatkan karakter, hubungan, keterampilan dan perasaan orang-orang.

Komunikasi organisasi adalah sebuah kegiatan menciptakan dan bertukar pesan dalam satu jaringan hubungan dengan cara saling bergantung satu sama lain untuk mengatasi sebuah masalah di lingkungan tersebut.

a. Tujuan Komunikasi Organisasi

Menurut liliweri dikutip dari (Silviani, 2019) menyatakan ada empat tujuan dari komunikasi organisasi yaitu:

 Menyatakan pendapat, pikiran, dan pandangan. Memberikan kesempatan kepada pemimpin organisasi dan para anggotanya untuk

- mengeluarkan inovasimua yang berhubungan dengan tugas dan fungsi dari tujuan organisasi tersebut.
- 2) Menyebarkan dan memberikan informas. Memberikan peluang kepada seluruh bagian organisasi untuk memberikan informasi dan menjelaskan mengenai visi, misi, tugas, fungsi organisasi, sub organisasi, individu maupun kelompok kerja dalam suatu organisasi.
- Mengeluarkan perasaan dan emosi. Memberikan kesempatan bagi seluruh unsur organisasi untuk bertukar informasi mengenai perasaan dan emosi
- 4) Tindakan koordinasi. Koordinasi bertujuan untuk menyelaraskan tugas dan fungsi organisasi antar sub bagian organisasi agar mencapai tujuan suatu organisasi. Organisasi tanpa koordinasi dan organisasi tanpa komunikasi sama dengan organisasi yang tidak menggambarkan aspek kerja sama yang baik.

b. Dimensi Komunikasi Organisasi

Terdapat dua dalam dimensi komunikasi organisasi, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal

 Komunikasi internal organisasi merupakan proses penyampaian pesan antar struktur organisasi untuk keberlangsungan kepentingan organisasi. Seperti komunikasi antara pemimpin dengan bawahan (komunikasi Vertikal), antara sesame bawahan (Horisontal), dsb.
 Bentuk komunikasi ini dapat berwujud komunikasi pribadi maupun kelompok, juga dapat secara primer maupun scunder melalui media massa.

- 2) Komunikasi eksternal organisasi adalah komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Pada beberapa lembaga atau perusahaan komunikasi ini dilakukan oleh kepala hubungan masyarakat dari pada pimpinan sendiri. Komunikasi eksternal terdiri dari jalur secara timbal balik:
 - a) Komunikasi dari organisasi kepada khalayak. Komunikasi tersebut umumnya dilaksanakan bersifat informatif yang dilakukan sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat terlibat secara batin. Contohnya: pidato radio, majalah, film documenter, poster, konferensi pers, berita melalui surat kabar.
 - b) Komunikasi dari khalayak kepada organisasi. Komunikasi tersebut merupakan umpan balik dari efek komunikasi yang dilakukan dari organisasi.

c. Hambatan Komunikasi Organisasi

Menurut Ron Ludlow dan Ferguys Panton terdapat tujuh hambatan yang menyebabkan komunikasi tidak efektif (Simamora, 2021):

1) Status Efect

Adanya perbedaan dari pengaruh status sosial yang dimiliki sosial, dalam organisasi contohnya yaitu komunikasi antara pimpinan dengan karyawan, sehingga karyawan akan patuh dan tunduk kepada pimpinan, sehingga karyawan tidak dapat menyampaikan aspiransinya dengan benar.

2) Semantic Problem

Faktor semantic menyangkut Bahasa yang digunakan komunikator sebagai alatg menyalurkan pikiran dan perasaan dengan komunikan. Misalnya kesalahan pengucapan demonstrasi menjadi demokrasi.

3) Perceptual distorsion

Disebabkan karena perbedaan cara pandang antara satu orang dengan orang lain.

4) Culture differences

Disebabkan adanya perbedaan budaya, agama, dan lingkungan sosial.

5) Physical Distractions

Disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses keberlangsungan komunikasi

6) Poor choice of communication channel

Disebabkan oleh media yang digunakan dalam melakukan komunikasi

7) No Feed back atau tidak adanya timbal balik dari komunikan terhadap komunikator

3. Strategi Komunikasi Humas

a. Konsep Strategi

Strategi berasal dari kata "*Strategos*" yang berarti "*generalship*". Secara harfiah strategi berarti "seni umum". Kata tersebut mengacu pada kata sifat "*strategia*" yang berarti "keahlian militer". Pemahaman strategi ditinjau dari

segi terminologi menurut Siagan (2004) adalah rangkaan keputusan dan tindakan yang ditetapkan manajemen puncak dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut (Halim, 2015). Sedangkan menurut Marrus, strategi diartikan sebagai proses menentukan manajemen puncak yang berfokus pada tujuan jangka Panjang suatu organisasi, yang dilakukan dengan menyusun cara untuk mencapai tujuan tersebut (Yanuaria, 2012). Pada dasarnya, berdasarkan pengertian dari beberapa tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu proses, aktivitas, tindakan sebuah organisasi yang disusun untuk mencapai tujuan atau sasaran jangka panjang organisasi tersebut.

1) Tahapan Strategi

Sebuah organisasi, perusahaan, lembaga membutuhkan dan menjalankan sebuah manajemen strategi. Lemabaga atau perusahaan yang menjalankan manajemen strategis lebih dapat mencapai *goals* atau tujuannya dibandingkan dengan lembaga yang tidak menjalankan manajemen strategi. Dengan adanya manajemen strategi, seorang pimpinan akan memiliki rencana yang lebih terarah, lebih matang dan jelas sehingga dapat memprediksi masa depan dengan lebih realistis. Di dalam prosesnya pimpinan dapat memberikankomitmen dan lebih peka terhadap isu internal perusahaan maupun eksternal perusahaan, sehingga organisasi akan memiliki rencana strategis dan rencana operasional yang terarah dan mudah untuk diikuti. Adapun tahapan manajemen strategi menurut Fred R. David meliputi:

- a) Formulasi Strategi, yaitu langkah awal yang dilakukan untuk merumuskan strategi. proses menyiapkan strategi untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Didalam formulasi Strategi terdapat pengembangan tujuan, identifikasi peluang dan ancaman dari eksernal organisasi atau lembaga, menentukan kelemahan internal, dan memilih *Plan of action* strategi yang akan dilaksanakan sebuah lebaga atau organisasi
- b) Implementasi strategi, adalah proses penyusunan dari *Plan of Action*. Setelah memilih strategi yang akan di tetapkan maka tahapan selanjutnya adalah melaksanaan strategi yang telah dipilih. Hal yang dibutuhkan dalan penyusunan strategi adalah sebuah komitmen dan kerja sama internal maupun eksternal suatu lembaga. Jika tidak adanya kerja sama yang baik maka proses dan analisis strategi tidak akan berjalan dan tujuan lembaga tidak akan tercapai.
- c) Evaluasi strategi ialah proses yang didalamnya terdapat menganalisis kemajuan pelaksanaan strategi, mengevaluasi *plan of Action* yang sudah terlaksana dan memperbaiki program atau strategi di masa depan. Selain itu juga evaluasi strategi diperlukan untuk memastikan sasaran atau tujuan sebuah lembaga atau organisasi telah tercapai atau belum tercapai.

2) Faktor yang mempengaruhi Strategi

Faktor yang mempengaruhi strategi ialah sebagai berikut (Onong Uchjana Effendy dalam buku Dinamika Komunikasi: 2008)

a) Faktor Lingkungan

Lingkungan sekitar organisasi sangat mempengaruhi strategi yang akan di jalankan sebuah organisasi, lingkungan bersifat dinamis artinya tidak pernah berada pada satu kondisi atau selalu berubah hal tersebut akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di lingkungan tersebut. Seperti masyarkat, cara berpikir dan tingkah laku, kebiasaan, kebutuhan dan tujuan serta pandangan hidup masyarakat.

b) Lingkungan organisasi

Lingkungan organisasi yaitu semua sumberdaya dan kebijakan organisasi atau Peraturan yang ditetapkan organisasi tersebut

c) Kepemimpinan

Seorang pemimpin sangat mempengaruhi strategi yang ada dikarenakan seorang pemimpin berperan penting dalam pengambilan keputusan tertinggi.

b. Strategi Komunikasi

Strategi Komunikasi adalah sebuah gabungan dari perencanaan Komunikasi dan Manajemen komunikasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan komunikasi. Dalam mencapai tujuan strategi komunikasi harus dapat menunjukan bagaimana Operasional secara

teknis yang harus dilakukan. Menurut Arifin (1984), terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah strategi komunikasi:

1) Menentukan Khalayak

Pada tahap ini langkah pertama seorang humas sebagai komunikator harus dapat menentukan komunikan yang akan dijadikan rujukan tujuan komunikasi sehingga kegiatan komunikasi dapat berjalan dengan efektif

2) Menyusun pesan

Penyusunan pesan dilakukan setelah menentukan dan mengetahui khalayak dan situasi. Penyusunan pesan dilakukan dengan menarik untuk dapat mendapat perhatian penuh dari para khalayak. Awal kegiatan komunikasi yang efektif adalah khalayak memperhatikan dengan seksama mengenai pesan-pesan yang disampaikan

3) Menetapkan metode

Pada dunia komunikasi penyampaian metode dilihat dari dua aspek yaitu menurut pelaksanaannya dengan cara semata-mata melihat komunikasi dari segi pelaksanaannya dengan tidak terlalu memperhatikan isi pesannya seperti contoh Redundancy/Repetition (mengulang pesan) dan Canalizing (penyedia saluran tertentu dalam menguasi motif khalayak), dan yang kedua adalah menurut bentuk isi pesan, yaitu melihat

komunikasi dari segi pernyataan atau bentuk pesan yang dimaksud seperti contoh informatif, persuasive, edukatif, dan koersif.

4. Evaluasi Strategi (Audit Komunikasi Kehumasan)

Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia) KBBI audit dapat diartikan sebagai pemeriksa pembukuan tentang keuangan, dan sebagai pengujain efektivitas keluar masuknya uang serta penilaian kewajaran laporan yang dihasilkannya.(KBBI, 1990:56).

Arti luas dari audit komunikasi yaitu mengenai analisis terhadap system komunikasi internal dan eksternal. Hamilton (Mohammed & Bungin, 2015) menyatakan, audit komunikasi adalah sebuah usaha menilai dan menganalisis tingkat kejelasan dan pemahaman, kesesuaian, dan efisiensi system komunikasi internal organisasi.

Pengertian audit komunikasi secara umum adalah suatu proses, perencaan yang cermat dalam bertindak untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan.

Sedangkan, audit komunikasi kehumasan adalah kegiatan menganalisis dan mempelajari mengenai kebutuhan komunikasi dalam hhumas dan praktek komunikasi yang sedang dijalankan kehumasan dalam suatu lembaga tertentu (Mohammed & Bungin, 2015).

a. Alasan dan Tujuan audit komunikasi

Alasan Audit komunikasi perlu dilaksanakan karena pimpinan dari suatu lembaga ingin mengetahui bagaimana sistem komunikasi yang sudah dilakukan di lembaga tersebut dalam menghadapi situasi atau krisis tertentu,

apakah system komunikasi tersebut sudah berjalan dengan baik dan sesuai atau belum sesui. Sehingga, pimpinan mengetahui bahwa kegiatan komunikasi pada karyawannya berdampak terhadap pencapaian tujuan lembaga.

Berikut macam tujuan audit komunikasi:

- 1) Menetukan sasaran dimana ketimpangan informasi terjadi terkait dengan topik, sumber, dan saluran komunikasi.
- 2) Menilai kualitas informasi.
- Mengukur kualitas hubungan komunikasi berdasarkan kepercayaan antar pribadi.
- 4) Mengenal jaringan aktif-operasional untuk memahami isu.
- 5) Mengenal *bottlenecks* (sumber kemacetan) dalam arus informasi, dan *gatekeeper* (penyaring informasi), dengan membandingkan peran komunikasi dalam prakteknya agar sesuai dengan peran yang seharusnya.
- Mengenal dan memahami pengalaman komunikasi baik yang positif maupun negatif.
- 7) Menggambarkan pola komunikasi yang terjadi pada tingkat pribadi, kelompok, dan lembaga berkaitan dengan topik, sumber, saluran, frekuensi, jangka waktu, dan kualitas interaksi.
- 8) Memberikan evaluasi mengenai sikap perilaku, praktek kebiasaa, dan keterampilan berdasarkan hasil audit komunikasi.

b. Model dalam audit komunikasi

(Hardjana, 2000) Model Audit Komunikasi menurut Howart Greenbaum (model struktur konseptual) dibagi menjadi dua kategori yaitu struktur keseluruhan sistem Komunikasi (Macro) dan Struktur kegiatan komunikasi khusus (micro).

- 1) Audit struktur keseluruhan sistem komunikasi (macro), meliputi:
 - a) Memperhatikan tujuan organisasi dan rencana organisasi untuk menentukan kebijakan organisasi.
 - b) Merencakan pelaksanaan dengan cara inventarisasi kegiatan komunikasi yang kemudian dianalisis seperlunya.
 - Menganalisis pelaksanaan dengan cara mengelompokan kegiatan komunikasi menurut tingkatan dan Fungsi komunikasi
 - d) Menganalisis sikap anggota melalui feedback operational dengan cara memberikan pertanyaan mengenai tanggung jawab dalam sistem komunikasi di organisasi tersebut.
 - e) Menganalisis faktor-faktor situasional Sumber Daya Manusia (pengaruh lingkungan dan perilaku pimpinan).
 - f) Setelah mengolah beberapa data tersebut kemudiann auditor memberikan usulan atau saran mengenai perubahan program komunikasi yang suportif.

2) Audit Struktur Kegiatan Komunikasi Khusus (micro)

- a) Memahami tujuan dan hakekat kegiatan komunikasi
- b) Menentukan rancangan atau prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan komunikasi dengan mempertimbangkan unsur

dalam teori komunikasi. Dalam hal ini peneliti melihat komponen strategi dari program komunikasi seperti pemilihan media, dan konten.

- c) Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan standar kinerja yang dianggap memenuhi syarat, sehingga dapat dijadikan tolok ukur kualitas kegiatan komunikasi (menetapkan sasaran, merumuskan strategi untuk mencapai target sasaran, menentukan sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar keberhasial dalam pencapaiuan tareget)
- d) Setelah melihat strategi yang dilakukan kemudian peneliti Mengumpulkan data dan membandingkan data yang terkumpul dari kinerja nyata kegiatan komunikasi untuk dijadikan bahan evaluasi maupun mengajukan usulan mengenai saran tindakan selanjut nya. Pada tahap ini peneliti menggunakan Teknik survei atau wawancara mendalam.

c. Teknik dan Metode Audit Komunikasi

Menurut (Hardjana, 2000) Audit komunikasi membutuhkan beberapa Teknik dan metode dalam menganalisis masalah-masalah dalam sistem komunikasi organisasi. Berikut lima alat ukur yang digunakan mendapatkan hasil audit.

1) Survai dengan kuesioner

Dalam menyusun kuesioner, para auditor harus memperhatikan pertanyaan yang akan disusun. Pertanyaan tersebut harus mengiring

responden untuk memberikan jawaban yang objektif, namun pertanyaan tersebut tidak boleh memojokan responden atau membuat pertanyaan yang menggiring sehingga membahayan reputasi dalam karier responden.

2) Wawancara tatap muka

Wawancara dilakukan sebagai saebagai upaya untuk memeriksa, menguji dan sebagai pelengkap data yang diperoleh melalui alat-alat ukur lainnya. Dalam kegiatan wawancara tersebut terdapat dua jenis wawancara yaitu pedoman wawancara pendalaman (Indept interview) dan pedoman wawancara penjajakan (exploratory). Perbedaannya adalah wawancara penajajakan digunakan untuk mengumpulkan informasi penting untuk pengenalan masalah dengan menggunakan pertanyaan terbuka, sedangkan indept interview adalah wawancara tindak lanjut yang dilakukan untuk membantu penafsiran dari temuan data yang diperoleh melalui alat ukur audit lain.

3) Analisis Jaringan

Analisis jaringan bertujuan untuk memetakan kegiatan komunikasi yang melibatkan responden dalam satuan organisasi atau unit kerjanya. Responden secara khusus diminta untuk menunjukan intensitas komunikasi antar rekan kerja didalam departemeen tersebut. Dalam Teknik ini auditor melihat bagaimana sistem komunikasi didalam departemen tersebut dan bagaimana responden menerima dan menyelesaikan tugas yang diberikan dari pimpinan departemen.

4) Pengalaman Komunikasi

Teknik analisis pengalaman komunikasi dikenal dengan istilah Teknik peristiwa kritis. Dalam Teknik ini responden diminta untuk menguraikan peristiwa komunikasi yang dianggap sebagai contoh dari peristiwa komunikasi yang berhasil maupun yang gagal. Pada contoh tersebut auditor dapat menarik kesimpulan mengenai kendala atau alas an mengenai mengapa kegiatan komunikasi di unit departemen tersebut berhasil atau gagal. Tujuan Teknik ini adalah untuk mengetahui profil dasar mengenai kesuksesan dan kegagalan komunikatif yang dilengkapi dengan analisis memadai, sebagai kelengkapan informasi tambahan yang diperoleh dari alat ukur lain.

5. Covid-19

Pada akhir 2019, tepatnya pada 31 Desember 2019 sampai dengan akhir tahun 2021 Negara-negara di seluruh dunia salah satunya Negara Indonesia mengalami penderitaan yang berkepanjangan dikarenakan kemunculan salah satu penyakit menular baru yang disebut Corona Virus 2019. Coronavirus atau yang dikenal masyarakat dengan virus Covid-19 yang menyebabkan penyakit dengan gejala ringan hingga berat. Seperti *Middle east Respiratory syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).

Karakter Covid-19 hampir mirip dengan penyakit epidemik lainnya seperti kolera, pes, flu burung, influenza, dll. Penularan virus tersebut melalui droplet atau cairan yang keluar dari lubang hidung dan mulut. Sehingga, memerlukan penanganan khusus untuk mencegah hingga menghindari virus

tersebut. Pasien yang tertular virus (penyintas) tersebut harus segera di isolasi dari orang yang belum tertular, dikarenakan penyebaran virusnya yang tergolong sangat cepat.

Pandemi Covid-19 yang merupakan sebuah fenomena baru bagi Indonesia, dan membuat seluruh kalangan baik pemerintah hingga masyarakat kalang kabut dalam menanganinya. Dikarenakan penyebaran virus yang semakin meluas pada masyarakat di seluruh Indonesia, juga berdampak besar dan merugikan bagi seluruh aspek kemasyarakatan maupun pemerintahan, baik itu faktor ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lainlain jika tidak ditangani dengan serius. Sehingga, membuat pemerintah menetapkan kebijakan baru untuk menangani fenomena baru tersebut. Kebijakan yang ditetapkan secara tertulis dalam bentuk undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda, Peraturan Bupati (perbup), hingga peraturan Walikota (Perwali) dan lain-lain termasuk didalamnya terdapat Surat Keputusan (SK) hingga Surat Edaran Walikota (SE). atau kebijakan yang tidak tertulis yaitu larangan dan himbaun mengenai pencegahan dan penaganan Covid-19 dari pemerintah, pemuka agama, kepala daerah, pemangku adat, atau petinggi yang dihormati lainnya. (Tuwu & Kendari, 2020).

Salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia dalam merespon penyebaran dan penularan Covid-19 yaitu, Sejak tanggal 17 April 2020, Presiden mengumumkan Virus Covid-19 sebagai bencana nasional melalui KEPRES No. 12 Tahun 2020, KEPRES No. 11/2020 tentang penetapan kedaruratan

Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019, PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam angka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019. (Tuwu & Kendari, 2020). Kasus virus tersebut terus mengalami peningkatan jumlah kasus positif hingga sekarang pada tanggal 27 Maret 2022 total jumlah kasus positif di Indonesia mencapai 5.995.876 total kasus, dengan angka kematian sebanyak 154.570 jiwa. Dampak setelah ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi bagi masyarakat sangat beragam. Salah satunya dampak *threat and fear* yaitu khalayak mengalami trauma, ketakutan dan terancam. Selain itu, dampak virus covid-19 sangat besar, dan bersifat global. Virus tersebut tidak hanya mengancam kesehatan khalayak/publik, namun juga mempengaruhi aktivitas ekonomi, social, psikologis, politik, Pendidikan, agama, dan lain lain. Sehingga dibutuhkan kebijakan dari pemerintah yang bertujuan tidak hanya untuk mencegah dan mengendalikan sebaran covid-19, namun juga kebijakan untuk mengatur kebiasaan baru yang ditimbulkan dari virus tersebut.

B. Kajian Pustaka

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggali informasi dari penelitianpenelitian terdahulu sebagai bahan acuan dan pembanding mengenai kebaharuan
penelitian baik kelebihan maupun kekurangan yang sudah ada. Selain itu,
peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun jurnal dalam rangka
mendapatkan informasi yang relevan tentang teori yang berkaitan dengan judul
yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

1. Sebuah penelitian yang dijadikan rujukan penulis yaitu penelitian dari Andhika (2021) Dalam penelitian tersebut penulis meneliti tentang efektivitas komunikasi Risiko Covid-19 oleh Pemerintah.penelitian tersebut meneliti mengenai Efektifitas program pemerintah dalam komunikasi risiko Covid-19 menggunakan metode kuantitatif. dengan melibatkan 20.708 responden tokoh agama, masyarakat, dan pemerintahan yang tersebar di provinsi Jawa Timur, NTB, dan Bali. Pada penelitian ini dikatakan efektif atau tidak program pemerintah dilihat dari respon masyarakat yang diberikan pertanyaan perihal Covid-19.

Kebaharuan yang akan penulis teliti adalah penulis akan melihat efektivitas komunikasi yang terjalin di dalam internal pemerintah dalam merencanakan, melaksakan, dan mengevaluasi kebijakan.

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan evaluasi pemkot pada penerapan kebijakan penanganan Covid-19.

2. Penelitian lain yang dijadikan rujukan penulis yaitu penelitian dari Kede (2021) Mahasiswa Universitas Hasanudin. Program Ilmu Komunikasi. Penelitian tersebut berjudul Analisis Manajemen Humas Dalam Penanganan Covid-19. Dalam penelitian tersebut penulis meneliti tentang analisis manajemen humas pemerintah daerah Kabupaten banggai dalam penanganan Covid-19. Berdasarkan penelitian tersebut, situasi di kabupaten banggai mengalami kenaikan kasus dari tahun ketahun, banyak masyarakat yang enggan untuk mematuhi protokol kesehatan dan

mengharapkan humas pemkab tersebut untuk lebih mengedukasi masyarakat. Peneliti menganalisis manajemen humas yang kemudian di evaluasi dengan menggunakan teori Butterick Keith yaitu a) Pengukuran semu; b) Opportunities To See (OTS); c) Advertising Value Equivalence (AVE); d) Evaluasi elektronik.

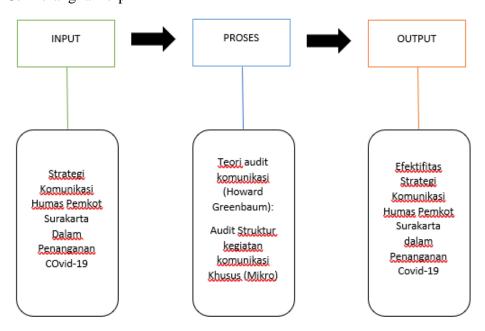
Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah keadaan dimana Covid-19 berubah dari pandemi menjadi endemi, dan memaksa masyarakat untuk tetap melakukan kebiasaan baru (*New Normal*). Meskipun dengan objek penelitian yang hampir sama yaitu humas pemerintah, namun tujuan pemerintah dalam menangani Covid sudah berbeda. Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian penulis yang meneliti mengenai evaluasi strategi Komunikasi Humas Dalam penanganan Covid-19 yang dijadikan sebagai bahan evaluasi pemerintah untuk menekan kemungkinan terjadinya lonjakan Covid-19.

3. Literasi Ketiga yang dijadikan rujukan penulis yaitu penelitian dari Hestiana (2020) Mahasiswa Universitas Sebelas Maret, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Penelitian tersebut berjudul Strategi Komunikasi Humas Pemkot Surakarta Dalam Mengatasi Kesimpangsiuran Berita Krisis Pandemi Covid-19 di Kota Surakarta Pada Periode Maret 2020-Juni 2020. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai berita atau informasi yang belum pasti sehingga membuat masyarakat Kota Surakarta menjadi bingung dan panik dalam krisis

pandemic. Covid-19, sehingga membutuhkan informasi factual dari pemerintah.

Covid-19 pada saat itu menjadi fenomena baru bagi masyarakat Indonesia sehingga terjadi *caos* dan menyebabkan banyak sekali informasi simpang siur beredar di tengah masyarakat, kebaharuan penelitian penulis yaitu mengenai keadaan pandemi Covid yang sudah berubah menjadi endemi sehingga peneliti mengevaluasi komunikasi dalam kinerja humas pemkot surakarta dalam menekan pertumbuhan Covid-19 yang dimungkinkan akan terjadi.

C. Kerangka Berpikir



- menentukan tujuan dan hakekat komunikasi
- menentukan rancangan dan prosedur (Strategi)
- menentukan petunjuk pelaksanaan dan standar kinerja (Tolok ukur keberhasilan)

Gambar III.1 Alur Penelitian

Pada Gambar III.1 menunjukan alur penelitian Evaluasi Strategi komunikasi Humas Pemkot Surakarta dalam Penanganan Covid-19. Pada input atau masukan pada penelitian tersebut ialah Strategi komunikasi Humas Pemkot Surakarta dalam Penanganan Covid-19. Kemudian input tersebut di proses dengan menggunakan Teori Audit Komunikas menurut Howard Greenbum menggunakan teori audit komunikasi mikro (struktur kegiatan komunikasi Khusus). Pada teori tersebut menjelaskan mengenai tahapan melakukan audit komunikasi mikro yaitu diantaranya:

- 1. Memahami tujuan dan hakekat kegiatan komunikasi
- Menentukan rancangan atau prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan komunikasi dengan mempertimbangkan unsur dalam teori komunikasi.
- Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan standar kinerja yang dianggap memenuhi syarat sehingga dapat dijadikan tolok ukur kualitas kegiatan komunikasi
- 4. Mengumpulkan data dan membandingkan data yang terkumpul dari kinerja nyata kegiatan komunikasi.

Sehingga akan menghasilkan output berupa hasil evaluasi Efektifitas Strategi Komunikasi Humas Pemkot Surakarta dalam Penanganan Covid-19.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif ialah penelitian kualitatif yang penyajiannya bersifat deskriptif, memfokuskan pada jawaban penelitian dengan pertanyaan yang berkaitan dengan 5W+1H(Siapa, Apa, Dimana, kenapa, dan bagaimana) peristiwa tersebut terjadi sehingga akhirnya di teliti secara mendalam untuk mendapatkan pola-pola yang muncul pada fenomena tersebut (Maylasari, 2022). Pada metode ini memiliki ciri utama yaitu, peneliti terjun langsung ke lapangan sebagai pengamat, merancang kategori pelaku, mengamati fenomena, mencatat dalam buku observasi, tidak memanipulasi variable, dan menitik beratkan pada observasi ilmiah (Yusuf, 2014)

B. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Protokol dan Komunikasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta tepatnya di Komp. Balaikota, Jalan Jend. Sudirman Kampung baru, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57133.

b. Waktu penelitian

Tanggal penelitian ini di mulai pada 10 Juli 2022 sampai dengan

17 Agustus 2022. di mana waktu penelitian tersebut digunakan untuk mendapatkan temuan data awal penelitian di lapangan dan pembuatan penelitian.

Tabel III.1 *Timeline* Skripsi

No	Kegiatan	Tahun 2022										
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pengajuan Proposal											
2	Penyusunan Proposal											
3	Pra Penelitian											
4	Seminar Proposal											
5	Revisi											
6	Penelitian											
7	Penyusunan Skripsi											
8	Analisis Data											
9	Sidang Munaqosyah											

C. Sumber Data

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut sumbernya, data penelitian diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran dan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Kepala Bagian Prokompim, Kasubag Prokompim, Staff Prokompim dan melaksanakan observasi lapangan langsung ke kantor Protokol dan Komunikasi

Sekretariat Daerah Kota Surakarta

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari pihak lain, tidak diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya, atau kebalikan dari data primer.

1) Studi Kepustakaan

Peneliti memperoleh data dengan membaca buku teks, catatan dan jurnal untuk mendapatkan perbandingan antara teori yang ada di lapangan.

2) Dokumentasi

Peneliti mendapatkan informasi melalui dokumentasi dari platform media internet untuk mendapatkan data-data dan pengamatan dari website, dan Instagram Pemkot Surakarta

D. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subek penelitian adalah keseluruhan dari sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasinya adalah Bagian Humas Pemerintah Kota Surakarta (Prokompim) yang termasuk kedalam Satgas Covid Kota Surakarta

b. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah terkait dengan Evaluasi Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Surakarta dalam

Penanganan Covid-19.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian yang dilakukan Penulis pengumpulan data menggunakan Teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Metode pengumpulan data yang satu ini merupakan cara yang banyak dijumpai pada peneliti lainnya. Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data pendahuluan guna menemukan permasalahan yang harus diteliti. Metode ini memerlukan narasumber guna menanggapi kasus ataupun pertanyaan peneliti. Peneliti mengumpulkan data baik komentar, perilaku, atau anggapan seorang yang ditunjuk selaku narasumber.

Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Sekretariat Daerah (PROKOMPIM)/Humas Kota Surakarta, dua Staff PROKOMPIM Kota Surakarta. Pada metode ini dibantu dengan alat perekam audio, dan catatan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan kejadian yang telah berlaku.

Dalam metode ini penulis ingin mendapatkan mengenai dokumendokumen, baik itu catatan sejarah, dan aturan kebijakan pemerintah yang diambil melalui website resmi Prokompim.surakarta.go.id,

website pemerintah kota Surakarta www.Surakarta.go.id dan akun instagram resmi @Pemkot_Solo selain itu juga foto agenda PROKOMPIM Kota Surakarta maupun dokumen yang terkait dengan fokus penelitian yang tentunya berguna dalam penelitian penulis.

c. Observasi

Observasi ialah metode yang digunakan guna menciptakan data dengan menyamakan dengan yang lain. Teknik ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan lansung ke objek penelitian hal ini dilakukan guna bisa melihat secara langsung kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan. Dalam metode ini penulis ingin mengetahui secara langsung bagaimana Evaluasi Strategi Komunikasi Humas dalam Penanganan Covid-19

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Uji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi data atau Sumber. Triangulasi data atau sember adalah metode pengumpulan data diambil dari berbagai sumber atau data yang berbeda. Mengumpulkan data dengan cara mencari kebenaran dari informan dengan berbagai metode pemeriksa keabsahan data yang menggunakan sesuatu lainnya diluar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding data tersebut. Contohnya, selain menggunakan wawancara atau observasi, peneliti mengumpulkan data atau mencari keabsahan data

menggunakan dokumen sejarah atau tertulis, arsip, catatan resmi, foto, atau video yang mendukung kebenaran data. Beberapa sumber tersebut akan menampilkan data yang berbeda dan memberikan gambaran yang berbeda tentang fenomena yang sedang diteliti oleh peneliti (Glinka, 2008). Triangulasi dilakukan dengan sumber data dan penelitian atau pengamatan lain. Teknik triangulasi yang digunakan yaitu Teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber (wawancara dan triangulasi) dengan membandingankan sumber lainnya (mengecek kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu, dan alat yang berbeda) dengan beberapa cara yaitu:

- Membandingkan apa yang dikatakan orang secara umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang terkait
- Mengadakan perbincangan dengan banyak informan sehingga mencapai pemahaman tentang suatu hal

Peneliti menggunakan teknik triangulasi berarti menggunakan tiga teknik pengumpulan yang berbeda dan digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan teknik observasi, indepth interview, dan dokumentasi sebagai sumber data yang sama.(Glinka, 2008)

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan Suatu kegiatan mengelompokan data

berdasarkan variable dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variable dari seluruh responden, menyajikan data tiap variable yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. (Glinka, 2008)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah berikut

a. Pengumpulan Data (Data Collection);

Data Collection yaitu mengumpulkan data dengan cara menganalisis data sebelum melaksanakan observasi (hipotesis sementara) dan mengumpulkan data saat observasi dengan cara menganalisis respon dari narasumber saat wawancara, jika dikata belum puas maka peneliti akan menanyakan pertanyaan sehingga peneliti menemukan data yang dianggap kredibel (Glinka, 2008).

c. Reduksi Data (Data Reduction),

Apabila data yang didapat di lapangan dirasa cukup banyak, maka peneliti akan mencatat dan meneliti secara rinci. Yang kemudian merangkum dan memilah hal-hal yang penting dan pokok, mencari tema dan pola data. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti mengumpulkan dan mencari data selanjutnya (Glinka, 2008).

d. Display Data (penyajian Data)

Setelah dilakukannya reduksi data, peneliti menyajikan data yang dapat dilakukan menggunakan table, grafik, pictogram, dan lain-lain. Dalam

hal ini menurut miles dan Huberman (1984) mengemukakan, penyajian data yang paling sering digunakan yaitu teks naratif. Dengan mennyajikan data, peneliti akan dipermudah dalam memahi dan merencakan kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman peneliti. Menyajikan data juga dapat dilakukan dengan grafik, matrik, maupun *chart* (Glinka, 2008).

e. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclution Drawing and Verification)

Setelah dilakukannya 3 (tiga) tahap di atas, maka peneliti akan mendapatkan verikasi data atau hasil akhir data dan kesimpulan data secara valid berdasarkan tahapan analisis data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sekretariat Daerah Kota Surakarta

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

Gambar Lambang Pemerintahan Kota Surakarta



Sumber: surakarta.go.id/?page_id=25548 (diakses pada 21 April 2022)

Sekretariat Daerah sebagai unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada tabel 2.1 merupakan struktur organisasi sekretariat daerah Berdasarkan pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.3 Tahun 2021 mengenai tim penyusun peraturan daerah tentang perangkat daerah dan pertaruan walikota tentang struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Surakartatahun anggaran 2021.

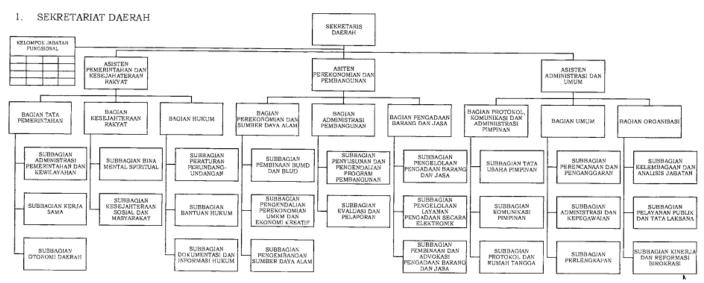
- a. Sekretaris Daerah.
- b. Asisten Pemerintahan, dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - 1) Bagian Pemerintahan, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah;

- c) Sub Bagian Kerjasama.
- 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual; dan
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat
- 3) Bagian Hukum, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Subbaguan Bantuan Hukum; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 - 1) Bagian perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
 - a) Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - b) Subbagian Pengendalian Perekonomian, UMKM dan
 Ekonomi Kreatif; dan
 - c) Subbagian Pemngembangan Sumber Daya Alam;
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Penyusunan dan Pengendalian Program
 Pembangunan; dan
 - b) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
 - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan

- c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan barang dan Jasa;
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan, Terdiri atas:
 - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
 - b) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c) Subbagian Protokol dan Rumah Tangga;
 - 2) Bagian Umum. Terdiri atas:
 - a) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran
 - b) Subbagian Administrasi dan Ke[egawaian; dan
 - c) Subbagian Perlengkapan;
 - 3) Bagian Organisasi, terdiri atas;
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan

c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Tabel 2.1. Struktur Sekretariat Daerah Kota Surakarta

2. Bagian Protokol Komunikasi dan Pimpinan Setda Kota Surakarta

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Surakarta mengatakan bahwa Berpedoman dari Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 6 Tahun 2008 maka dibentuklah Humas dan Protokol Setda Kota Surakarta yang pada tahun 2020 silam berganti nama menjadi Protokol Komunikasi dan Pimpinan Setda Kota Surakarta (Prokompim). Bagian Protokol Komunikasi dan Pimpinan Setda Kota Surakarta sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakartayang ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi yag luas, nyata dan bertanggung jawab secara efektif dan efesien dalan mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan umum maupun kesejahteraan masyarakat di bidang komunikasi dan informasi.

"berdasarkan struktur organisasi, nanti bisa di cek di JDIH ya itu di perwali tentang struktur organisasi tahun 2020. Karna waktu itu sudah berubah dengan yang sekarang, strukturnya udah beda. Ketika saya masih menjabat disana strukturnya sudah berbeda dengan yang sekarang. Bisa di lihat di perwali tahun 2017-2021" (Hasil wawancara dengan Wahyu Kristina, SS, MM Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan daerah Kota Surakarta pada tanggal 02 Agustus 2022 pukul 13.15)

Bagian Protokol Komunikasi dan Pimpinan Setda Kota Surakarta merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kota Surakartayang berkompeten dalam tata informasi untuk menjalankan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan peningkata kualitas pelayanan umum maupun kesejahteraan masyarakat yang berbudaya di bidang informasi, komunikasi dan keprotokolan. Di sisi lain dalam menjalankan peran kehumasan dan keprotokolan, informasi merupakan sumber daya dalam rangka membangun cintra positif bagi penyelenggaraan pemerintahan.

a. Visi dan Misi Bagian Potokol Komunikasi dan Pimpinan Setada Kota Surakarta

Visi

Dengan mengacu pada Visi Pemerintah Kota Surakarta, maka Bagian Protokol Komunikasi dan Pimpinan Setda Kota Surakarta memiliki Visi "Mewujudkan sistem pelayanan informasi yang berbudaya, cepat, tepat, akurat, transparan dan obyektif berbasis pada pengelolaan sumber daya informasi."

Visi tersebut mengandung makna Protokol Komunikasi dan Pimpinan Setda Kota Surakarta merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kota Surakartayang berkompeten dalam tata informasi untuk menjalankan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan dalam penyelenggaraaan pemerintahan daerah untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan umum maupun kesejahteraan masyarakat yang berbudaya di bidang informasi, komunikasi dan keprotokolan. Di sisi lain dalam menjalankan peran kehumasan dan keprotokolan, informasi merupakan sumber daya dalam rangka membangun pencitraan yang positif bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Misi

- Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam semua bidang pembangunan, serta perekatan kehidupan bermasyarakat dengan komitmen cinta kota yang berlandaskan pada nilai-nilai "Solo Kota Budaya".
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam pengusahaan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, guna mewujudkan inovasi dan integrasi masyarakat madani yang berlandaskan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan dan Strategi Bagian Protokol Komunikasi dan Pimpinan Setda Kota Surakarta

1) Tujuan

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat Tujuan yang akan dicapai oleh Bagian Protokol Komunikasi dan Pimpinan Setda Kota Surakarta, yaitu :

- a) Mewujudkan pelayanan informasi yang prima dan berkualitas.
- b) Mewujudkan komunikasi yang harmonis antara Pemerintah Kota, masyarakat, dan pers serta lembaga lainnya.
- c) Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
- d) Meningkatnya penyebarluasan informasi dan aspirasi masyarakat.
- e) Mewujudkan citra yang positif bagi Pemerintah Kota Surakarta.

2) Strategi

Guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan strategi sebagai berikut :

- a) Memaksimalkan peran dan fungsi kehumasan dan keprotokolan dalam pencitraan pemerintah daerah yang positif.
- b) Memanfaatkan sumber daya informasi.

 Meningkatkan kerjasama kehumasan dan keprotokolan dengan pers, masyarakat dan lembaga kehumasan lainnya.

3) Tugas

Pada hasil wawancara dengan Kabag Prokompim menyatakan bahwa tugas prokompim seharusnya tidak dalam ranah kehumasan, dikarenakan kegiatan kehumasan sudah menjadi bagian dari diskominfo dikarenakan masih masa transisi sehingga, Prokompim tetap membantu Diskominfo dalam hal fungsi kehumasan.

"jadi sebenarnya ketika kita sudah menjadi menjadi bagian Prokompim (Protokol dan Komunikasi Pimpinan). Fungsi kehumasan sudah tidak lagi menjadi tugas prokompim fungsi kehumasan sudah di Tarik ke Diskominfo. Prokompim bertugas untuk pelayanan pimpinan, yang menjadi pimpinan yaitu walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah dan staff ahli. Hanya karena masih masa transisi dari pengalihan...e.. apa Namanya, fungsi yang semula dipegang oleh humas protokol, Kemudian sekarang menjadi fungsi yang ada di kominfo, nah ini kita masih mengerjakan tugas yang seharusnya sudah menjadi urusan diskominfo" (Hasil wawancara dengan Wahyu Kristina, SS, MM Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan daerah Kota Surakarta pada tanggal 02 Agustus 2022 pukul 13.15)

Berdasarkan peraturan walikota Surakarta Nomor 25.3 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah pada pasal 59 mengenai kepala subbagian komunikasi pimpinan mempunyai tugas melaksakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah penyiapan bahan, penyiaoan bahan pemantauan kebijakan dan evaluasi kebijakan

daerah di bidang komunikasi pimpinan dan dokumentasi.

Dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Menyiapkan bahan informasi dan jadwal kegiatan walikota dan wakil walikota.
- b) Memberikan informasi mengenai jadwal dan kegiatan walikota dan wakil walikota
- c) Mengkoordinasi jadwal dan kegiatan walikota dan wakil walikota.
- d) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi komunikasi walikota dan wakil walikota.
- e) Menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah.
- f) Memberi masukan kepada kepala bagian tentang penyampaian informasi tertentu.
- g) Menghimbau dan mengolah informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan walikota dan wakil walikota
- h) Mendokumentasikan kegiatan walikota dan wakil walikota
- i) Mengelola website sekretariat daerah.
- j) Melaksanakan tatausaha bagian meliputi keuangan, persuratan, asset, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.
- k) Menyusun naskah sambutan dan pidato walikota dan wakil walikota.
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanakaan kegiatan komunikasi pimpinan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut.

- m) Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan subbagian komunikasi pimpinan baik lisan maupun tertulis kepada kepala bagian protokol, komunikasi dan administrasi pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sajian Data

1. Data Covid di Kota Surakarta

Kebijakan awal Pemerintah Indonesia dalam merespon penyebaran dan penularan Covid-19 yaitu, Sejak tanggal 17 April 2020, Presiden mengumumkan Virus Covid-19 sebagai bencana nasional melalui KEPRES No. 12 Tahun 2020, KEPRES No. 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019, PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam angka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019. (Tuwu & Kendari, 2020)

Pemerintah Kota Surakarta merespon KEPRES No. 11 Tahun 2020 mengenai penetapan kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019, PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam angka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dengan mengeluarkan Surat Edaran Walikota Kebijakan awal Pemkot Surakarta yaitu dengan menetapkan Surat Edaran Nomor 443.26/581 Tahun 2020 yaitu mengenai kesiapsiagaan menghadapi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pada 13 Maret 2020 Kota Surakarta merupakan daerah awal ditemukannya pasien Covid-19 di Propinsi Jawa tengah dalam keadaan meninggal dunia di RSUD dr Moewardi Kota Surakarta, kemudian pasien terus bertambah baik dikalangan tenaga kesahatan maupun masyarakat umum Sehingga Walikota Surakarta kemudian menetapkan Kota Surakarta sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan ditetapkannya Surat Keputusan Nomor 443.76/28 Tahun 2020. (Sumber: Corona di Solo: Korban Pertama di Jateng hingga Pernah Jadi Zona Hitam (detik.com)

Kasus Virus Covid-19 di Kota Surakarta mengalami 3 (tiga) kali gelombang peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan, dengan berbagai varian Covid-19 seperti gelombang pertama varian Virus Covid, gelombang kedua Covid versi Delta, dan gelombang ketiga yaitu Covid versi Omnicorn dengan jumlah kumulatif pasien mencapai 35.946 (data Covid Kota Surakarta per-19 Agustus 2022). Lonjakan pertama kasus Covid di Kota Surakarta terjadi pada 12 Juli 2020 dengan penambahan jumlah kasus sebanyak 18 orang yang merupakan catatan tertinggi yang pada catatan hari sebelumnya hanya bertambah 1-2 kasus per harinya. akumulasi jumlah kasus positif Covid pertanggal 12 Juli 2020 sebanyak 63 orang dengan rincian 37 sembuh, 22 pasien rawat inap, 4 orang meninggal. Data tersebut dilansir dari berbagai sumber berita online dan infografis dari Instagram pemkot_Solo dikarenakan Pemerintah Kota Surakarta belum membuat portal website mengenai kasus *up to date* dan rekapitulasi data penambahan kasus Covid-19 tiap harinya.

Lonjakan Covid-19 tahun 2021 mulai terjadi pada tanggal 6 Juli 2021 kenaikan jumlah harian rumah terpapar Covid-19 mencapai lebih dari 400 rumah

dalam jangka waktu 5 hari. Kemudian puncak kenaikan kasus Covid-19 terjadi pada tanggal 20 Juli 2021 yaitu sebanyak 1489 rumah warga Kota Surakarta terjangkit Virus Covid-19. Pada tanggal 27 Juli 2021- 07 September 2021 terjadi penurunan kasus Covid-19 secara signifikan.



Lonjakan Covid-19 pada gelombang ketiga terjadi pada 10 Februari 2022 lonjakan kasus Covid-19 mencapai lebih dari 200 kasus dengan rentang waktu 5 hari. Puncak lonjakan kasus Covid-19 mencapai 905 kasus yaitu pada tanggal 25 Februari hingga 02 Maret 2022. Pada bulan Maret hingga Juni 2022 terjadi penurunan kasus Covid-19 secara signifikan hingga menyentuh angka 0 kasus. pada bulan Agustus 2022 kasus tersebut bertambah namun tidak lebih dari 15 kasus.

a. Satuan Gagasan penanganan Covid-19 Kota Surakarta

Pemerintah Kota Surakarta dalam menangani Covid-19 mengeluarkan kebijakan mengenai Keputusan Walikota Surakarta Nomor 443.05/99.2 Tahun 2020 sebagai yang ditetapkan pada tanggal 30 September 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kota Surakarta sebagai pembaharuan dari Keputusan Walikota Nomor 443.0599.2 tahun 2020 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

1. Tugas dan Tujuan Satgas Covid-19

- a) melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Surakarta;
- b) menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Surakarta;
- c) melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Surakarta;
- d) menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-angkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Surakarta; dan

e) melaporkan pelaksanaan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019
 (COVID-19) kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi.

2. Struktur Satuan Tugas Penanganan COVID-19

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Surakarta merupakan implementasi dari pasal 12 peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2020 mengenai komite penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan pemulihan ekonomi nasional. Sehingga, walikota Surakarta menetapkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Surakarta berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 443.05/99.2 Tahun 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Prokompim menyatakan bahwa prokompim masuk kedalam satgas Covid-19 yang menjabat sebagai Tim Bidang Komunikasi Publik

"ya.. prokompim masuk kedalam satgas Covid-19 sebagai Bidang Komunikasi kalau tidak salah ya.." (Hasil wawancara dengan Wahyu Kristina, SS, MM Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan daerah Kota Surakarta pada tanggal 02 Agustus 2022 pukul 13.15)

Sesuai dengan hasil hasil wawancara dengan Kasubag Komunikasi dan Dokumentasi yang menyatakan hal serupa dengan Kabag Prokompim.

"ya, Prokompim itu masuk (satgas covid) bagian komunikasi publik" (Hasil wawancara dengan kasubag Suroso, S.IP pada tanggal 20 Juli 2022 pukul 12.34 WIB)

Humas Pemerintah Kota Surakarta yang saat ini dikenal dengan sebutan Protokol dan Komunikasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta merupakan salah satu instansi yang tergabung dalam struktur Satuan Tugas (satgas) Penanganan Covid-19 sebagai Bidang Komunikasi dan Publikasi yang berkerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Komunikasi dan Informasi, Polisi resort, Sekretariat

Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, Kodim 0735 dan lain lain. yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan kegiatan komunikasi publik pencegahan dan penanggulangan Covid-19 berdasar arahan tugas penaganan Covid-19
- b) Mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya sebagai mitera di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi publik
- c) Menyebarluaskan informasi publik yang diterima dari satgas Covid kota

Berikut Struktur Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Surakarta

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA SURAKARTA

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
1	Walikota Surakarta	Ketua	 a. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota; b. menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi; c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya: d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 dr Kecamatan, Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya: e. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kecamatan, kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; dan f. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi.
	WAKIL KETUA		
1	Wakil Walikota Surakarta	Wakil 1	a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan
2	Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta	Wakil 2	penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
3	Komandan Kodim 0735/Surakarta	Wakil 3	yang berbasis pentahelix;
4	Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta	Wakil 4	b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu
5	Ketua DPRD Kota Surakarta	Wakil 5	beban dan tanggung jawab Ketua;
6	Sekretaris Daerah Kota Surakarta	Wakil 6	 mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota; dan d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.

	SEKRETARIAT		
1	Kepala Pelaksana Harian Badan	Sekretaris	a. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas
	Penanggulangan Bencana Daerah		Penanganan COVID-19;
	Kota Surakarta		b. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan
2	Kepala Dinas Kesehatan Kota	Anggota	kesekretariatan lain yang diperlukan;
	Surakarta		c. melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal
3	Inspektur Kota Surakarta	Anggota	administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas
4	Kepala Badan Pendapatan,	Anggota	Penanganan COVID-19 Kota;
	Pengelolaan Keuangan dan Aset		d. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian
	Daerah Kota Surakarta		Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang
5	Kepala Bagian Hukum Sekretariat	Anggota	diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19,
	Daerah Kota Surakarta		e. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam
6	Kepala Bagian Layanan Pengadaan	Anggota	mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19;
	Barang/Jasa Sekretariat Daerah		f. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai
	Kota Surakarta		rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7	Kepala Bagian Perekonomian	Anggota	g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan
	Sekretariat Daerah Kota Surakarta		pelaksanaan penanganan COVID-19.
8	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat	Anggota	
	Daerah Kota Surakarta		
9	Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat	Anggota	
	Daerah Kota Surakarta		
10	Kepala Bagian Umum Sekretariat	Anggota	
	Daerah Kota Surakarta		
11	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM	TUGAS
		GUGUS TUGAS	
	Sekretariat Daerah Kota Surakarta		
	BIDANG DATA DAN INFORMASI		
1	Asisten Pengembangan Ekonomi	Ketua	a. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan
	Sekretariat Daerah Kota Surakarta		informasi;
2	Kepala Badan Perencanaan	Anggota	b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-
	Penelitian dan Pengembangan		19 Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk
	Daerah Kota Surakarta		mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas
3	Kepala Dinas Kesehatan Kota	Anggota	yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari
	Surakarta		Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota;
4	Kepala Dinas Perhubungan Kota	Anggota	c. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan
	Surakarta		masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-
5	Kepala Dinas Komunikasi dan	Anggota	19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-
	Informatika Kota Surakarta		19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas
6	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota	Penanganan COVID-19 di tingkat provinsi;
	Sekretariat Daerah Kota Surakarta		d. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan
7	Kepala Badan Intelijen Negara	Anggota	hingga ke tataran RT/RW;
	Daerah - Kota Surakarta		e. menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19; dan f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan
8	Kepala Badan Pusat Statistik Kota	Anggota	capaian Bidang Data dan Informasi.
	Surakarta		capaian bidang Data dan informasi.
9	Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
	Kota Surakarta		
10	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan	Anggota	
	Perindustrian Kota Surakarta		
11	Kepala Dinas Penanaman Modal dan	Anggota	
- 10	PTSP Kota Surakarta		
12	Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan	Anggota	
	Pangan dan Perikanan Kota		
	Surakarta		
13	Kepala Dinas Perdagangan Kota	Anggota	
l	Surakarta		

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
14	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Surakarta	Anggota	
15	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Surakarta	Anggota	
16	Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta	Anggota	
17	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surakarta	Anggota	
18	Camat se-Kota Surakarta	Anggota	
	BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK		
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Surakarta	Ketua	a. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota;
2	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Surakarta	Anggota	b. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan
3	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Surakarta	Anggota	c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota.
4	Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surakarta	Anggota	
5	Personil dari Kodim 0735/Surakarta	Anggota	
6	Personil Kepolisian Resor Kota Surakarta	Anggota	
10	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta	Anggota	
11	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta	Anggota	
12	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota	Anggota	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM	TUGAS
		GUGUS TUGAS	
	Surakarta		
13	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta	Anggota	
14	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surakarta	Anggota	
15	Lurah se-Kota Surakarta	Anggota	1
	BIDANG PERUBAHAN PERILAKU		
1	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Surakarta	Ketua	a. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai
2	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta	Anggota	kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
3	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta	Anggota	 b. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas kecamatan,
4	Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta	Anggota	kelurahan hingga tataran RW/RT;
5	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta	Anggota	 c. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, kelurahan hingga
6	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta	Anggota	tataran RW/RT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;
7	Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta	Anggota	 d. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, kelurahan untuk memastikan kelembagaan
8	Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta	Anggota	Satuan Tugas ditataran kecamatan, kelurahan dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan
9	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta	Anggota	e. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.
10	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta	Anggota	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM	TUGAS
		GUGUS TUGAS	
11	Kepala Dinas Pariwisata Kota	Anggota	
	Surakarta		
12	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
	Kota Surakarta		
13	Kepala Dinas Kebudayaan Kota	Anggota	
	Surakarta		
14	Kepala Dinas Kepemudaan dan	Anggota	
	Olahraga Kota Surakarta		
15	Kepala Bagian Administrasi	Anggota	
	Pembangunan Sekretariat Daerah		
	Kota Surakarta		
	BIDANG PENANGANAN		
	KESEHATAN		
1	Kepala Dinas Kesehatan Kota	Koordinator	a. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana
	Surakarta		kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material
2	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan	Anggota	kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi
	Penataan Ruang Kota Surakarta		ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;
3	Detasemen Kesehatan Wilayah	Anggota	b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-
4	Paurkas Bag. Sumda Kepolisian	Anggota	19 Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal
	Resor Kota Surakarta		prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan
5	Direktur Rumah Sakit se-Kota	Anggota	dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kota terkait
	Surakarta		penanganan kesehatan;
6	Kepala UPT Puskesmas se-Kota	Anggota	c. memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan
	Surakarta		protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun
7	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan	Anggota	rumah sakit swasta, puskesmas;
	Daerah		d. memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan
8	Kepala UPT Instalasi Farmasi	Anggota	melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan
			secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM	TUGAS
		GUGUS TUGAS	
			oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat Kota; e. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID-19; f. bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan hingga tataran Kelurahan dan RW/RT memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya; g. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait; h. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium); i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan dari wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten/kota; dan j. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.
	BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN		a. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara
	PENDISIPLINAN		yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta	Koordinator	b. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 tingkat Kota terkait warga
2	Kepala Dinas Kesehatan Kota	Anggoto	pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit,
2	Surakarta Kesenatan Kota	Anggota	warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
3	Inspektur Kota Surakarta	Anggota	karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas
4	Kepala Badan Kepegawaian,	Anggota	Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
	Pendidikan dan Pelatihan Kota		c. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara
	Surakarta		berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi
5	Kepala Dinas Perhubungan Kota		menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
	Surakarta		d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan
6	Kepala Bagian Hukum Sekretariat	Anggota	masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari
	Daerah Kota Surakarta		kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat: dan
7	Personil dari Kodim 0735/Surakarta	Anggota	e. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada
8	Personil dari Kepolisian Resor Kota	Anggota	pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan
	Surakarta		publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dan
9	Personil dari Kejaksaan Negeri	Anggota	kegiatan sejenis.
	Surakarta		
	BIDANG RELAWAN		a. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan
1	Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta	Ketua	relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan
2	Kepala Pelaksana Harian Badan	Anggota	COVID-19;
	Penanggulangan Bencana Daerah		b. mengelola relawan medis dan non medis dengan memberikan
	Kota Surakarta		penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk
3	Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan
	Kota Surakarta		peruntukkannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun
4	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19;
	Kota Surakarta		c. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-
5	Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang	Anggota	bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kota
	Kota Surakarta		yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas
6	Palang Merah Indonesia (PMI) Kota	Anggota	Penanganan COVID-19 di tataran kecamatan, kelurahan, RW dan
	Surakarta		RT jika diperlukan;
7	Perhimpunan Masyarakat Surakarta	Anggota	d. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19;
	(PMS)		e. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan;
			dan

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM	TUGAS
		GUGUS TUGAS	
8	Kamar Dagang dan Industri	Anggota	f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan Anggota
	Indonesia (KADIN) Surakarta		dan capaian Bidang Relawan.
9	Garda Solo Relawan	Anggota	
10	Pramuka Peduli Bencana	Anggota	
	TIM AHLI		
1.	Tim Ahli dari Fakultas Kedokteran		a. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan
	Universitas Sebelas Maret		COVID-19 di Daerah;
2.	Tim Ahli dari Fakultas Kedokteran		b. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis
	Universitas Muhammadiyah		dalam penanganan COVID-19 di Daerah; dan
	Surakarta		c. menyusun skenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka
			empirik.

3. Kebijakan Penanganan COVID-19 di Kota Surakarta

Covid-19 merupakan bencana nasional yang menimbulkan masalah di beberapa sektor seperti Pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan dan lain sebagainya, salah satu strategi yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat sebuah kebijakan penanganan wabah Covid-19. Kebijakan multi sektor merupakan salah satu hal penting dalam mengurangi penyebaran, memperkukuh ketahanan dan pengendalian Virus Covid-19. (Umaroh., 2021)

Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surakarta dalam menangani kasus Covid-19 terdapat pada Surat Edaran Walikota, mengenai Corona Disease Virus (Covid-19). Surat Edaran (SE) Walikota tersebut merupakan kebijakan multi sektor, diantaranya Ekonomi, Sosial Budaya, Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, dan pemerintahan.

Pada sektor Ekonomi diantaranya terdapat pengaturan untuk kegiatan CFD, Pariwisata, Mall, pasar, dan pembatasan jam operasional fasilitas/ tempat umum yang terdapat pada Surat Edaran Nomor 510/708 Tahun 2020 dan di perpanjang sesuai dengan kondisi lonjakan kasus Covid-19 hingga tahun 2021. Pada sektor sosial terdapat peraturan mengenai pembatasan aktivitas pertemuan warga terkait pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Surakarta, aturan social distancing dilingkungan kerja dan masyarakat yang terdapat pada Surat Edaran Nomor 443.76/718 Tahun 2020 yang akan diperpanjang dan akan diganti sesuai dengan keadaan dan kondisi Covid-19. Pada sektor keagamaan Peniadaan Sementara Kegiatan Peribadatan dan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) yang terdapat pada Surat Edaran Nomor KS.00.23/1086/2022, pada sektor kesehatan mengatur mengenai pemakaian masker non medis/kain, pengetatan Protokol kesehatan yang diatur dalam SE Walikota nomor 440/798 tahun 2020, pada sektor Pendidikan yaitu imbauan belajar di rumah untuk jenjang SD-SMA yaitu diatur pada SE Nomor 800/767 Tahun 2020, terakhir pada sektor pemerintahan yang mengatur mengenai pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 (Keputusan Walikota Surakarta Nomor 443.05/34.3 Tahun 2020), pembentukan satgas Covid-19 (Keputusan Walikota NOMOR 443.05/99.2 TAHUN 2020), dan penerapan WFH bagi ASN (Surat Edaran Nomor 061.1/840 Tahun 2020) yang akan diperbaharui sesuai dengan situasi dan kondisi Covid-19 di Kota Surakarta.

4. Strategi Humas Dalam Penanganan Covid-19

a. Tujuan Strategi Humas

Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Surakarta berperan sebagai Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, memiliki tujuan strategi komunikasi Humas Pemerintah Kota Surakarta yang berdasarkan Tupoksi dan tugas. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian Protokol dan Komunikasi pimpinan sekretariat daerah Kota Surakarta Secara umum sama dengan tujuan pemerintah yaitu melaksanakan kegiatan komunikasi publik terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19, menyebarluaskan informasi publik yang diterima dari satgas Covid-19 Kota Surakarta.

"ya pasti ya (mendukung pemerintah), kalau tujuan utamanya kita adalah bagaimana kebijakan pimpinan itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat." (Hasil wawancara dengan Wahyu Kristina, SS, MM Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan daerah Kota Surakarta pada tanggal 02 Agustus 2022 pukul 13.15)

Informan lain yaitu kepala Sub Bagian komunikasi dan Dokumentasi pimpinan Sekretariat Daerah Kota Surakarta juga menyatakan bahwa tujuan humas adalah untuk mendukung pemerintah dalam penanganan dan menekan laju Covid-

19, Humas Pemkot Surakarta masuk kedalam struktur satgas Covid-19 pada bidang komunikasi dan informasi Publik.

"kalau mendukung (pemerintah) buat menekan Covid-19 itu pasti ya, karena humas masuk ke (bagian) satgas " (Hasil wawancara dengan kasubag Suroso, S.IP pada tanggal 20 Juli 2022 pukul 12.34 WIB)

Di sisi lain, hasil wawancara dengan Staff Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Surakarta (Novrian Panji) menyatakan hal yang sama dengan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Surakarta bahwa tujuan humas sama dengan tujuan Pemerintah Kota Surakarta dalam penanganan Covid-19 seperti pada saat kepemimpinan Walikota Fx Hady Rudyatmo yang menggenjot penerapkan Protokol Kesehatan dan menjalani fenomena baru dengan Selogan DO MANUTO! (*Dumadakan Ono Memolo Anyar Nungul Urip Tanpo Ono Obate*) yang artinya "Mendadak ada penyakit muncul hidup Bersama kita namanya COVID-19 yang belum ada obatnya" dan pelaksanaan Vaksinasi Dosis 1, dan pada kepemimpinan Walikota Gibran menggenjot Vaksinasi Dosis 1, dosis 2 dan Booster, dan Humas Pemkot Surakarta medukung program pemerintah tersebut dengan cara menyampaikan Kebijakan Pemerintah kepada Masyarakat Kota Surakarta.

"ya tujuan kita sama dengan tujuan Pemerintah Kota Surakarta ya.. istilahnya mendukung tujuan Pemerintah Kota Surakarta dalam menangani pandemi Covid-19. Kalau dulu pas Pak Rudy masih menjabat ya.. itu ada istilah 'DO MANUTO!' itu, kalau waktu Pak Gibran (Gelombang 2 dan 3) ya tujuan Pemkot kan percepatan Vaksinasi ya.. kita mendukungnya dengan menyampaikan kebijakan pimpinan kepada masyarakat Solo" (Hasil wawancara dengan Staff Prokompim Novrian Panji pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 11.24 WIB)

b. Rancangan Strategi Humas

1) Perencanaan Program Penanganan Covid-19

Rancangan kegiatan program evaluasi humas pemkot kota Surakarta dalam penanganan Covid adalah Melaksanakan program kerja sesuai dengan Kebijakan Surat Edaran Walikota Surakarta mengenai Virus Covid-19 pada rapat koordinasi covid-19 sebelumnya. Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Prokompim Kota Surakarta didapatkan bahwa sebelum kegiatan penangan Covid-19 dilakukan berlandaskan Surat Edaran (Kebijakan) PPKM dalam pengetatan protokol kesehatan.

"Kalau Covid kan kita (dalam menentukan rancangan) berdasarkan Surat Edaran yang setiap kali di terbitkan setiap 2 minggu atau 15 hari sekali muncul surat edaran untuk PPKM ya. Itu sebagai landasan untuk kegiatan baik masyarakat maupun pemerintah atau swasta, itu untuk melakukan kegiatan yang tidak melanggar, eh apa Namanya.. harus sesuai dengan protokol kesehatan yang dicantumkan di PPKM itu, landasannya. Nah fungsi kehumasan adalah mensosialisasikan kebijakan tersebut ke seluruh lapisan masyarakat. Pernikahan apakah sudah boleh, tatacaranya bagaimana kemudian pengaturan wfh wfo kemudain untuk sekolah. Nah itu disosialisasikan disitu, nah untuk fungsinya humas itu disitu, menyampaikan ke masyarakat, nah itu ada sknya nah sebagai tim satgas covid." (Hasil wawancara dengan Wahyu Kristina, SS, MM Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan daerah Kota Surakarta pada tanggal 02 Agustus 2022 pukul 13.15)

Sesuai dengan Kepala bagian Prokompin. kepala sub bagian komunikasi dan dokumentasi juga menyatakan hal serupa, bahwa kegiatan penanganan Covid-19 yang dilakukan Humas berlandaskan pada Kebijakan SE walikota.

"Publikasi informasi komunikasi subtansi itu (kinerja humas) tidak berubah, namun pelaksanaan program kinerja humas yang berubah, caranya lebih banyak ke virtual. Kalau sebelumnya (Covid) itu ada sih sosialisasi offline atau tatap muka, waktu covid itu di hilangkan, sosialisasi waktu covid itu sekarang (dilakukan secara) Virtual, ya sesuai dengan SE Walikota itu,.." (Hasil wawancara dengan Staff Prokompim Novrian Panji pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 11.24 WIB)

Pada poin selanjutnya yaitu menurut Kepala Bagian Prokompim, sebelum pelaksanaan penanganan Covid dilakukan, Humas pemkot Surakarta melakukan koordinasi dengan Sekretaris Pribadi Walikota Surakarta dalam mengetahui jadwal Walikota mengenai rapat koordinasi Covid-19 dalam menerapkan kebijakan Covid-19 hal tersebut sekaligus menjadi jadwal liputan Humas Prokompim, dari prokompim di sebarkan jadwal Rapat Koordinasi Covid-19 kepada Wartawan dengan komunikasi melalui WhatsApp Grup.

"yaa awalnya kita mendapatkan informasi agenda walikota khususnya rapat koordinasi Covid itu dari sespri (sekretaris Pribadi) walikota. Nah dari agenda tersebut kita sebarkan kepada staff, sama wartawan lewat grup wa itu.. buat datang ke rapat itu, terus hasil rapatnya yang berbentuk pembaharuan kebijakan dibuat rilis sama staff prokompim. Nah rilisnya itu disebarkan ke wa grupnya lokawarta (pers)." (Hasil wawancara dengan Wahyu Kristina, SS, MM Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan daerah Kota Surakarta pada tanggal 02 Agustus 2022 pukul 13.15)

Sehingga perencanaan kegiatan berdasarkan hasil observasi lapangan dan hasil wawancara pada Protokol dan Komunikasi Sekretariat daerah Kota Surakarta dalam penanganan Covid-19 adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan program kerja sesuai dengan Kebijakan Surat Edaran Walikota Surakarta mengenai Virus Covid-19 pada rapat koordinasi covid-19 sebelumnya.
- Sekretaris pribadi walikota Surakarta mengelola surat undangan mengeni rapat koordinasi Covid-19, Dari sekretaris pribadi, agenda

- tersebut kemudian dikirim kepada Kepala Bagian Prokompim dan kepala sub bagian komunikasi dan dokumentasi melalui WhatsApp
- c) Kemudian mengkoordinasi jadwal walikota tersebut kepada staff prokompim
- d) Staff prokompim mengkoordinasi Pers/media partner (Lokawarta) melalui WhatsApp Grup.
- e) Saat rapat koordinasi Covid-19, hasil dari rapat tersebut kemudian dibuat rilis dan dokumentasi kemudian di upload pada website dan Instagram
- f) Hasil rilis dan dokumentasi tersebut kemudian dikirim kepada pihak pers untuk di sebar luaskan pada media online berita masing-masing pers

2) Pemilihan Konten dan Media

Pada pemilihan konten dan media yang digunakan Protokol komunikasi dan pimpinan daerah Kota Surakarta ialah prokompim menggunakan media sosial dan media pers serta konvensional untuk memberikan informasi mengenai kebijakan SE walikota dalam penangan Covid-19, sesuai dengan hasil wawancara dengan Kabag Prokompim.

"Kalau kita punya saluran untuk komunikasi melalui sosial media maupun media kovensional (cetak maupun elektronik). Disebelah kita itu ada lokawarta nah itu saluran komunikasi kita. Jadi mau di sosmed, mau di TV juga ada radio juga ada kemudian media cetak maupun majalah adalah cara kita untuk menyampaikan kebijakan tersebut." (Hasil wawancara dengan Wahyu Kristina, SS, MM Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan daerah Kota Surakarta pada tanggal 02 Agustus 2022 pukul 13.15)

Media Pers atau wartawan tersebut bertugas sebagai sarana menyampaikan kebijakan mengenai Covid-19 agar kebijakan tersebut dapat disebarluaskan di berbagai media konvensional sehingga masyarakat Kota Surakarta dapat mengetahui dan menerapkan kebijakan tersebut. Sesuai dengan hasil wawncara dengan staff prokompim.

"kalau media yang digunakan ya medsos, ya media konvensional juga, media elektronik juga, media cetak juga sering masang iklan layanan masyarakat itu sih" (Hasil wawancara dengan Staff Prokompim Novrian Panji pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 11.24 WIB)

3) Petunjuk pelaksanaan/strategi dan standar kinerja humas dalam penanganan Covid-19

1) Menetapkan standar indikator keberhasilan dan sasaran strategi

Menurut staff Prokompim Kota Surakarta Novrian Panji, mengatakan bahwa target sasaran dari strategi humas membantu Pemerintah Kota Surakarta dalam penanganan Covid-19 adalah Masyarakat Kota Surakarta, dengan indicator keberhasilannya yaitu masyarakat mengetahui kebijakan dan update mengenai Covid-19 di Kota Surakarta

".. untuk indikator keberhasilan humasnya ya intinya informasi yang ingin disampaikan tercapai ke masyarakat, karna sasaran kebijakan itu masyarakat Kota Surakarta, ya masyarakat akhirnya tahu oh ternyata Solo sekarang udah PPKM Level 2, level 3 itu bisa kita lihat dari itu sih dimedsoskan misalnya banyak yang Komen itu otomatis banyak yang baca, yang *like*" ,.." (Hasil wawancara dengan Staff Prokompim Novrian Panji pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 11.24 WIB)

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Prokompim juga mengatakan hal yang sama dengan yang dikatakan oleh narasumber sebelumnya. Beliau mengatakan bahwa sasaran utama Strategi penanganan Covid yang dilakukan oleh Prokompim adalah masyarakat kota Surakarta, dan indikator keberhasilan strategi prokompim ialah kebijakan yang didesiminasikan oleh pemkot Surakarta harus diterima dengan baik kepada masyarakat kota Surakarta.

"Kita kan sasarannya masyarakat Kota Surakarta ya, ya Indicator keberhasilan itu ya kalau tone beritanya positif, iya kan? Selama saya disana itu positif gak pernah negatif. Jangan sampai negatif. Nah itu tugas kita. Karena memang menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat berartikan jangan sampai diterima negative oleh masyarakat kan, nah *piye carane*, nah dengan strategi strategi" (Hasil wawancara dengan Wahyu Kristina, SS, MM Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan daerah Kota Surakarta pada tanggal 02 Agustus 2022 pukul 13.15)

Kasubag Prokompim juga menjelaskan bahwa sasaran strategi tersebut untuk masyarakat Kota Surakarta dengan indikator keberhasilan yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh dua narasumber sebelumnya

"Untuk sasarannya itu kan masyarakat Kota Solo, ya Pokoknya gimana caranya biar masyarakat itu tahu mengenai sosialisasi kebijakan kita itu. Gimana caranya ya lewat sosialisasi di TV, Radio, sama Instagram yang sudah saya jelaskan tadi" (Hasil wawancara dengan kasubag Suroso, S.IP pada tanggal 20 Juli 2022 pukul 12.34 WIB)

2) Petunjuk pelaksanaan atau strategi penanganan Covid-19

Petunjuk pelaksanaan yang merupakan sebuah Strategi adalah suatu proses, aktivitas, tindakan sebuah organisasi yang disusun untuk mencapai tujuan atau sasaran jangka panjang organisasi tersebut. Sesuai dengan tujuan awal Prokompim dalam penanganan Covid-19, yaitu menekan laju covid-19. Prokompim dalam mencapai tujuan memerlukan strategi yang dianggap

memenuhi standar keberhasilan adalah dengan cara sosialisasi kebijakan secara virtual melalui media sosial Pemkot Surakarta, website, dan media konvensional dalam hal publikasinya. Seperti yang dijelaskan pada hasil wawancara dengan kasubag Prokompim.

"Publikasi informasi komunikasi subtansi itu (kinerja humas) tidak berubah, namun pelaksanaan program kinerja humas yang berubah, caranya lebih banyak ke virtual. Kalau sebelumnya (Covid) itu ada sih sosialisasi offline atau tatap muka, waktu covid itu di hilangkan, sosialisasi waktu covid itu sekarang (dilakukan secara) Virtual, ya sesuai dengan SE Walikota itu, Selain kita kerjasama dengan wartawan itu kita ada sendiri kita fokuskan kita buat futurial dikasihkan lewat koran-koran tapi semua kegiatan tetep ngundang wartawan. Semua boleh memberitakan, terus ditayangkan di banyak media (seperti) radio TV, itu.. radio lewat dialog interaktif ada, terus kemudian dengan iklan layanan masyarakat, di TATV ada dialog interaktif kemudian sosialisasi lewat media tradisional, kemudian lewat media cetak (koran)." (Hasil wawancara dengan kasubag Suroso, S.IP pada tanggal 20 Juli 2022 pukul 12.34 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti mengelompokan kegiatan Humas menjadi tiga gelombang dengan masing-masing gelombang memiliki 3 (tiga) metode diantaranya

- a) metode informatif yaitu mendesiminasikan informasi ter-update mengenai Covid-19 di Kota Surakarta
- b) metode persuasive yaitu mendesiminasikan Informasi terkait Kebijakan Surat Edaran.
- c) Metode edukatif yaitu melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yang dipublikasikan melalui media sosial Instagram Resmi Pemkot Surakarta Website Resmi Pemkot Surakarta dan bekerja sama

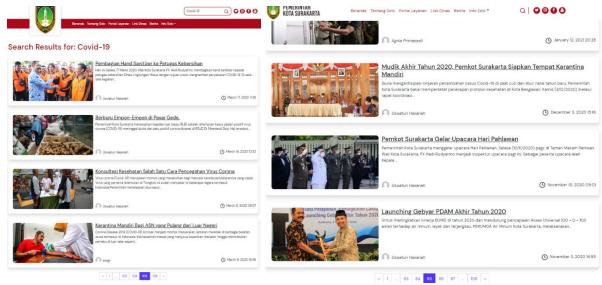
dengan media pers untuk di publikasikan melalui platform berita online masing-masing instansi.

5. Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Surakarta

a. Covid-19 Gelombang pertama (Maret-Desember 2020)

1) Memberikan informasi ter-update mengenai Covid-19 di Kota Surakarta

Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Surakarta telah memanfaatkan sistem digital di era perkembangan globalisasi saat ini. Humas Pemerintah Kota Surakarta melalui website resminya yang saat itu masih di pegang oleh Humas dan Protokol (Protokol dan Komunikasi Pimpinan) Sekretariat Daerah Kota Surakarta membuat rilis guna menyampaikan informasi Up to date mengenai perkembangan kasus Covid-19 di Kota Surakarta . Hasil pencarian Covid-19 pada tahun 2020 sebanyak 79 rilis yang terdapat pada hasil pencarian berita di Website Pemerintah Kota Surakarta (Surakarta.go.id) dimulai pada halaman 85 hingga halaman 105.



Gambar III. 1

(Hasil data pencarian Covid-19 tahun 2020 pada Website Pemkot Surakarta)



Gambar III. 2

(Update data Covid-19 pertama pada tanggal 7 April 2020 melalui Instagram

Pemkot_Solo)

Akun Instagram Resmi Kota Surakarta (Pemkot_Solo) juga digunakan oleh Humas Kota Surakarta sebagai media informasi yang faktual selain website. Data penambahan kasus Covid-19 juga diinformasikan dari hasil konferensi pers Satuan gugus tugas Covid-19 kepada para Followers akun Instagram resmi untuk dilakukan pembaharuan setiap hari, dimulai pada tanggal 07 April 2020 hingga 20 Juli 2020 yang seharusnya terus di update pada desember 2020.

Pada 07 April 2020 Humas Pemkot Surakarta memberikan informasi pertambahan Virus Covid-19 selama ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) yaitu jumlah orang dalam pengawasan (ODP) dari yang sebelumnya sebanyak 286 pasien menjadi 311. jumlah pasien rawat inap sebanyak 113 pasien dan rawat jalan sebanyak 86 pasien. sedangkan kasus PDP meninggal perhari sebanyak 7 kasus, 17 pasien dan pasien sembuh sebanyak 23 orang, untuk penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 2 pasien rawat inap, 1 pasien dinyatakan sembuh dan 2 pasien meninggal dunia.

Update mengenai penambahan jumlah pasien Covid terus di perbaharui, Namun pada tanggal 1 juni 2020- 20 juli 2020 update mengenai kasus Covid-19 pada tahun 2020 tidak rutin dilakukan setiap hari. Bahkan humas pemkot kota Surakarta tidak update selama 15 hari yaitu pada tanggal 1-16 juni 2020. Sebelum akhirnya Pemerintah Kota Surakarta membuat Website Khusus Update Covid-19. (Data lengkap Update Kasus Covid-19 Terlampir)



Gambar III. 3 (Penetapan Kota Surakarta sebagai Kejadian Luar Biasa, Sumber :

<u>Solo Ditetapkan KLB Corona, Wali Kota Sebut Itu Bentuk Keseriusan</u>

<u>Pemerintah (kompas.com)</u>

Pers juga bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta Sebagai Media dalam Publikasi, seperti pada Berita Online Kompas.com yang memberikan informasi mengenai Penetapan KLB di Kota Surakarta. Penetapan KLB bentuk dalam keseriusan Pemerintah Kota Surakarta untuk menanganangi dan mencegah Virus Corona. KLB juga merupakan bentuk kesiap siagaan Pemerintah Kota Surakarta, dibuktikan dengan adanya kasus pasien meninggal dengan status positif Covid-19, Pemerintah Kota Surakarta langsung melakukan tracking dengan warga yang sudah pernah kontak langsung dengan pasien meninggal (source: Solo Ditetapkan KLB Corona, Wali Kota Sebut Itu Bentuk Keseriusan Pemerintah (kompas.com))

2) Mendesiminasikan Informasi terkait Kebijakan Surat Edaran

Pemerintah Kota Surakarta dalam menekan laju Covid-19 mengeluarkan kebijakan-Kebijakan multi sektor yang diperbaharuhi setiap 15 hari sekali, kebijakan yang ditetapkan Satgas Covid-19 Kota Surakarta kemudian diinformasikan kepada masyarakat melalui beberapa platform seperti akun Instagram Resmi Pemkot_Solo seperti pada gambar III.3 penekanan Virus Covid-19 SE Walikota Nomor 443.26/581 Tahun 2020 dan website resmi Surakarta.go.id seperti pada gambar II.4 (Source lengkap SE Walikota terkait Covid-19 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (surakarta.go.id)). Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain terdapat kebijakan kesiapsiagaan menghadapi Covid-19, penetapan WFH untuk Pendidikan dan kantor, pembatasan jam operasional untuk Mall dan pasar, kebijakan pemakaian Masker non medis, dan perpanjangan kebijakan dikarenakan kenaikan jumlah kasusu Covid-19.



Gambar III. 4 (Surat Edaran pada Instagram: Pemkot_Solo)



Gambar III. 5 (Rilis Surat Edaran yang diupload melalui Website Surakarta.go.id)

Tedapat 31 kebijakan daerah yang diterbitkan pada bulan Maret hingga Desember 2020 terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Kota Surakarta (tabel 1). Kebijakan pertama diterbitkan pada tangal 4 maret dan di*upload* oleh Humas Pemkot Surakarta melalui akun Instagram resminya mengenai kesiap siagaan menghadapi Covid-19 dan kebijakan terakhir tahun 2020 mengenai antisipasi terkait peningkatan Covid-19 pada libur natal dan tahun baru 2021 yaitu kebijakan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/0001748. Daftar kebijakan Lengkap Kota Surakarta periode Maret hingga Desember 2020 (*Terlampir*)

Wali Kota Surakarta: Karantina khusus berlaku bagi pemudik

@ Jumat. 11 Desember 2020 14:02 WIB



Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo (ANTARA/Aris Wasita)

Solo (ANTARA) - Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo menyatakan aturan karantina yang akan dilakukan pada libur Natal dan Tahun Baru 2020 khusus diberlakukan bagi pemudik sehingga masyarakat yang melakukan perjalanan biasa tidak perlu khawatir.

Media pers juga ikut dalam penyebaran kebijakan terbaru mengenai SE Walikota mengenai penanganan COvid-19. Salah satunya yaitu pada libur natal dan tahun baru Pemerintah Kota Surakarta mempublish kebijakan Surat Edaran Nomor 067/3119 Tahun 2020. Pada tanggal yang sama antaranews.com membantu pemerintah dalam menyebarkan berita mengenai adanya aturan karantina yang dilakukan pemkot Surakarta pada libur Natal dan Tahun baru yang diberlakukan bagi pemudik sebagai antisipasi lonjakan Covid-19 di Kota Surakarta (Sumber: Wali Kota Surakarta: Karantina khusus berlaku bagi pemudik - ANTARA News)

3) Sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan

Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan Humas Pemerintah Kota Surakarta dalam penanganan Covid-19 dilakukan di beberapa platform seperti Instagram,

Website resmi Pemkot Surakarta, dan menjalin kerjasama dengan media pers untuk publikasinya.

Pada gelombang pertama kasus Covid-19, Humas Pemkot Surakarta melakukan sosialisasi perihal kedisiplinan penerapan Protokol Kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker dan sarung tangan untuk seluruh masyarakat Kota Surakarta dan SOP mengenai pelaksanaan Kegiatan berskala besar seperti hajatan, atau kegiatan berkumpul lainnya.

a) media sosial Instagram Pemkot_solo

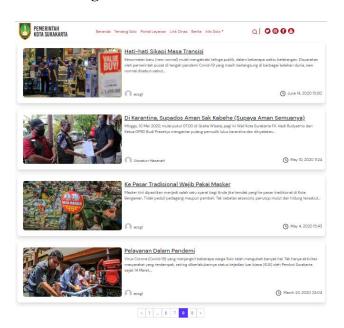






Gambar III. 6 (Sosialisasi Humas Pemkot Surakarta melalui IG:Pemkot_Solo)

b) website Surakarta.go.id



Gambar III. 7 (Rilis mengenai Sosialisasi yang dilakukan oleh Walikota Surakarta dan Humas Pemkot Surakarta)

c) Platform berita online



Gambar III. 8 (Source: <u>Wali Kota Solo Sebut Pencegahan Tertular Virus Corona</u>

<u>Tak Berat Dilakukan (kompas.com)</u>)

Berdasarkan gambar III.8 mengenai berita yang diunggah melalui platform berita online kompas.com pada tanggal 13 maret 2020 silam, menjelaskan sosialisasi dari walikota Surakarta untuk masyarakat Kota Surakarta agar tetap menerapkan pola hidup sehat, dan mencegah penyebaran Virus Covid-19. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk tidak panik dalam menghadapi Virus Covid-19 dikarenakan Pemerintah Kota Surakarta sudah mengatisipasi lonjakan Covid-19 dengan menetapkan Surat Edaran, dan sosialisasi di car free day.



Gambar III. 9 (Source: <u>Cegah Penularan Covid-19, Pemkot Surakarta Wajibkan</u>

<u>Pelaku Usaha Kirim Proposal (kompas.com)</u>)

Berdasarkan Gambar III.9 menjelaskan mengenai sosialisasi yang diunggah pada tanggal 30 Juni 2020 melalui platform media online Kompas.com, tentang pembuatan proposal untuk pelaku usaha dan masyarakat yang hendak mengadakan hajatan atau pertemuan besar. Proposal tersebut bertujuan untuk menurunkan tim Supervisi dari TNI-AD untuk menertibkan dan mengawal protokol kesehatan dan apabila terjadi kasus positif Covid-19, pemerintah dapat melacak sumber penyebaran tersebut agar bisa di *tracking*.

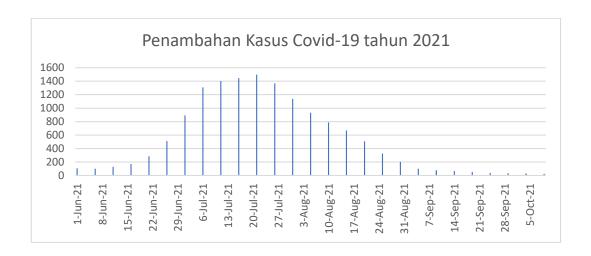
b. Strategi humas dalam penanganan Covid-19 Gelombang kedua (Tahun Januari-Desember 2021)

Tetap berdasarkan Tupoksi dan tugas yang berperan sebagai Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 seperti pada kasus Covid-19 Gelombang pertama. Pada Januari 2021 silam Pemerintah Kota Surakarta telah menerima dosis vaksin sinovac, sehingga

strategi humas pada pada tahun 2021 mengenai capaian Vaksinasi untuk masyarakat Kota Surakarta dan pengetatan Protokol Kesehatan (Source: Walikota Bersama Sekda Kota Surakarta, Terima 10.609-An Dosis Vaksin Sinovac – Pemerintah Kota Surakarta)

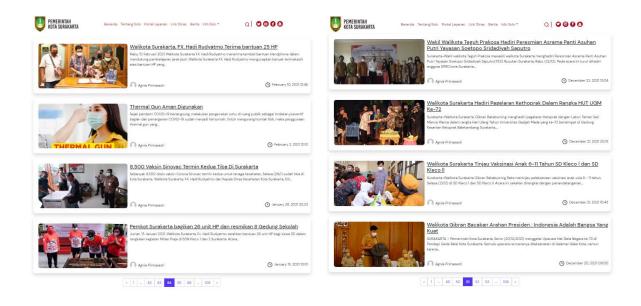
1) Memberikan informasi ter-update mengenai Covid-19 di Kota Surakarta

Berdasarkan pada gambar III.10 pada bulan Maret 2021 Pemerintah Kota Surakarta membuat platform website bernama intip.covid.surakarta.go.id sehingga mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai penambahan jumlah kasus Covid-19, pada grafik tersebut menjelaskan kenaikan jumlah Kasus COvid-19 mulai terjadi pada bulan juni hingga juli 2021 dan terjadi penurunan kasus COvid-19 pada akhir bulan juli hingga akhir tahun 2021(terlampir). selain melalui website resmi Surakarta.go.id yang dikelola oleh Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Surakarta dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) dalam penanganan Covid-19. Berdasarkan gambar III.11 Hasil pencarian Covid-19 pada tahun 2021 sebanyak 135 rilis pada hasil pencarian berita di Website Pemerintah Kota Surakarta (Surakarta.go.id).



Gambar III. 10 (grafik lonjakan jumlah Covid-19 per Juni-Desember 2021

Dashboard Statistik | Data Covid-19 Kota Surakarta tahun 2021)



Gambar III. 11 ((Hasil data pencarian Covid-19 tahun 2021 pada Website Pemkot Surakarta)

Penambahan Kasus Harian Covid-19 di Kota Surakarta Mulai Melandai

Angka penambahan kasus positif Covid-19 harian di Kota Surakarta, Jawa Tengah, mulai melandai beberapa waktu terakhir. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor penurunan kasus harian

Oleh NINO CITRA ANUGRAHANTO









комиделино pretugas menata bahan-bahan pokok di Hypermart di Solo Grand Mall, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (3/7, perbelanjaan bahan pokok masih di perbolehkan selama masa PPKM darurat. Dengan adanya pembatasan, suat terpantau lengang.

SURAKARTA, KOMPAS - Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di Kota Surakarta, Jawa Tengah, mulai berdampak. Kasus harian Covid-19 mulai melandai. Penambahan kasus harian diharapkan terus menurun seiring dengan pengawasan ketat kegiatan masvarakat.

Gambar III. 12 Update Penambahan Kasus Harian Covid-19 di Kota Surakarta Penambahan Kasus Harian Covid-19 di Kota Surakarta Mulai Melandai - Kompas.id

Pada gambar III.12 menjelaskan berita Kompas.com yang dipublikasikan pada tanggal 3 Agustus 2021 menyatakan bahwa Kebijakan Pemberlakuaan Kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta berdampak pada penururnan kasus Covid-19 mulai pada tanggal 03 agustus 2021.pemerintah melalkukan testing dan tracing dengan maksimal dengan target jumlah tes Covid-19 sebanyak 1000 orang tiap harinya, dan isolasi tiap wilayah dengan pasien positif COvid-19 mulai ditingkatkan dan diketatkan. (Sumber: Penambahan Kasus Harian Covid-19 di Kota Surakarta Mulai Melandai - Kompas.id)

2) Mendesiminasikan Informasi terkait Kebijakan Surat Edaran

Seperti pada gelombang pertama, Pemerintah Kota Surakarta dalam menekan laju Covid-19 mengeluarkan kebijakan Kebijakan multi sektor yang di perbaharuhi setiap 15 hari sekali, kebijakan yang ditetapkan Satgas Covid-19 Kota Surakarta kemudian diinformasikan kepada masyarakat melalui beberapa platform seperti akun Instagram Resmi Pemkot_Solo dan pada website Surakarta.go.id seperti pada gambar III.13





Gambar III. 13 (Posting Pembaraharuan SE mengenai Kebijakan PPKM pada

Instagram pemkot_solo)

Tedapat 28 kebijakan daerah yang diterbitkan pada bulan januari hingga Desember 2021 terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Kota Surakarta (*Data Lengkap Terlampir*). Kebijakan pertama diterbitkan pada tangal 8 Januari 2021 dan di*upload* oleh Humas Pemkot Surakarta melalui akun Instagram resminya mengenai Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk pengendalian penyebaran COVID-19 dan kebijakan terakhir tahun 2021 mengenai perpanjang PPKM Level 2 COVID-19 pada libur natal dan tahun baru 2022 yaitu Surat Edaran Nomor 067/4904. Kebijakan tersebut terus diperbaharui setiap seminggu sekali menyesuaikan situasi kondisi Covid-19 di kota Surakarta.



Sinergi Tangani Covid-19, Walikota, Wakil Walikota dan Forkopimda Bahas Penerapan PPKM Mikro Darurat, 3-20 Juli 2021

O MAY L 2021 HIS

Gambar III. 14 (menjelaskan mengenai Rapat Koordinasi percepatan penganan Covid-19 terkait pemberlakuan PPKM mikro darurat pada tanggal 3-20 Juli 202, Sumber: surakarta.go.id/?p=20191)



Gambar III. 15 (<u>Solo Terapkan PPKM Darurat Mulai 3 Juli, Gibran: Warga Tak Perlu Panik</u>

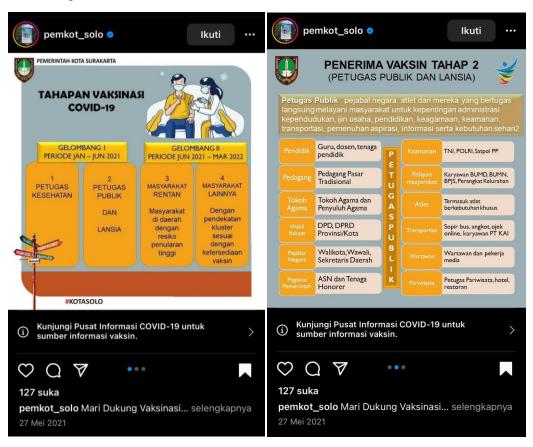
<u>Halaman all - Kompas.com</u>)

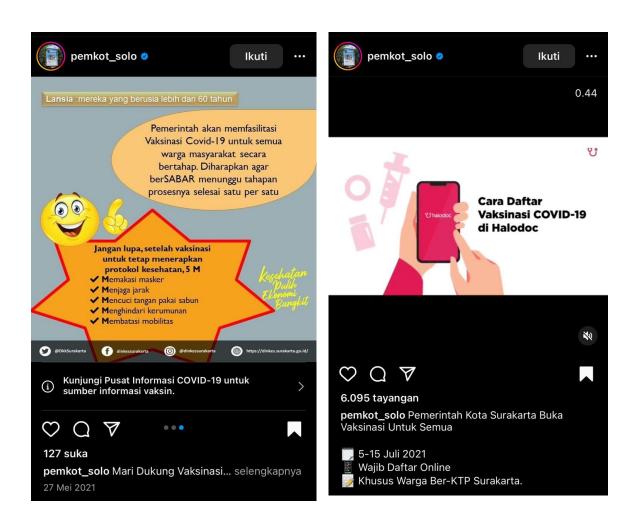
Berita yang dipublikasikan oleh kompas.com pada gambar III.15 merupakan salah satu contoh dari media yang berkerja sama dengan pemkot Surakarta perihal publikasi kebijakan pada Gambar III.14 yang di unggah melalui website resmi Pemkot Surakarta yang berisi pengetatan penerapan 100 WFH untuk seluruh kegiatan belajar mengajar dan 50 persen WFO pada cakupan sektor esensial seperti perhotelan, perbankan, dan industry orientasi ekspor dengan Protokol kesehatan ketat. Pada sektor nonesensial harus dilakukan WFH dan pusat perbelanjaan hanya menerima delivery order, dengan tetap melakukan akselerasi vaksinasi.

3) Sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi

Pada gelombang kedua ini kegiatan sosialisasi dan edukasi Humas pemkot Surakarta dilakukan di beberapa platform seperti halnya pada gelombang pertama yaitu Instagram, Website resmi Pemkot Surakarta, dan menjalin kerjasama dengan media pers untuk publikasinya. Pada gelombang kedua ini tujuan edukasi yaitu mengenai penerapan Protokol kesehatan dan kebut Vaksinasi dosis I.

a) Instagram





Gambar III. 16 (Sosialisasi dan edukasi masyarakat Surakarta mengenai vaksinasi dan Penerapan Protokol Kesehatan

b) Website Surakarta.go.id



Gambar III. 17 ((Rilis mengenai Sosialisasi yang dilakukan oleh Walikota Surakarta dan Humas Pemkot Surakarta source: website Surakarta.go.id)

c) Media online Pers

Ini lokasi dan jadwal vaksinasi Covid-19 di Solo untuk sore dan malam hari

Rabu, 20 Oktober 2021 | 18:34 WIB Penulis: Virdita Ratriani



ILUSTRASI. Ini lokasi dan jadwal vaksinasi Covid-19 di Solo untuk sore dan malam hari. KONTAN/Fransiskus Simbolon.

Gambar III. 18 (Sosialisasi Vaksinasi, source <u>Ini lokasi dan jadwal</u> <u>vaksinasi Covid-19 di Solo untuk sore dan malam hari</u> <u>(kontan.co.id)</u>)

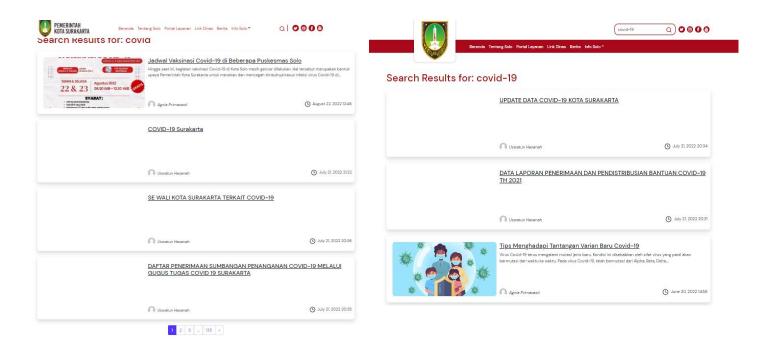
Sosialisasi vaksinasi juga dilakukan oleh platform berita online kontan.co.id pada tanggal 20 Oktober 2021 berisi tentang diadakannya Vaksinasi pada sore dan malam hari sesuai pada Gambar III.18. pada berita tersebut menjelaskan lokasi, waktu pelaksanaan vaksinasi dan syarat ketentuan vaksinasi.

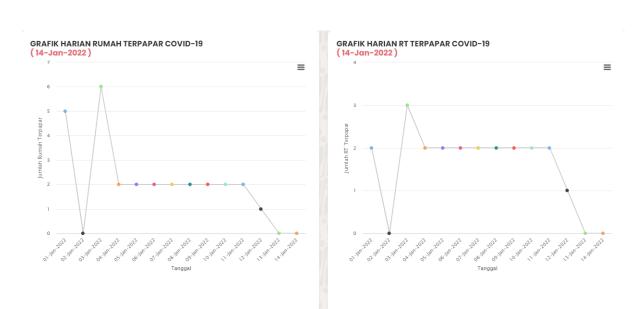
c. Strategi Humas dalam penanganan Covid-19 Gelombang ketiga (Januariagustus 2022)

berdasarkan Tupoksi dan tugas Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Surakarta yang berperan sebagai Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, pada gelombang ketiga Covid-19 ini strategi Humas Pemerintah Kota Surakarta yaitu membantu pemerintah dalam publikasi kebijakan dan sosialisasi mengenai Vaksinasi Booster dan menerapkan Protokol Kesehatan tetap dengan selogan percepat Vaksinasi sesuai dengan arahan Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka

1) Memberikan informasi ter-update mengenai Covid-19 di Kota Surakarta

Pada gelombang ketiga ini Pemerintah Kota Surakarta tetap menggunakan website resmi mengenai Covid-19 yaitu intip.covid.surakarta.go.id seperti pada gelombang kedua untuk update perhari kasus COvid-19 yang terjadi di Kota Surakarta terdapat pada gambar III.19. Protokol Komunikasi dan pimpinan Sekretariat Daerah Kota Surakarta yang berperan sebagai lembaga informasi kebijakan, tetap menggunakan website resmi pemkot Surakarta dan Instagram resmi pemkot Surakarta sebagai platform publikasinya seperti pada gambar III.20.

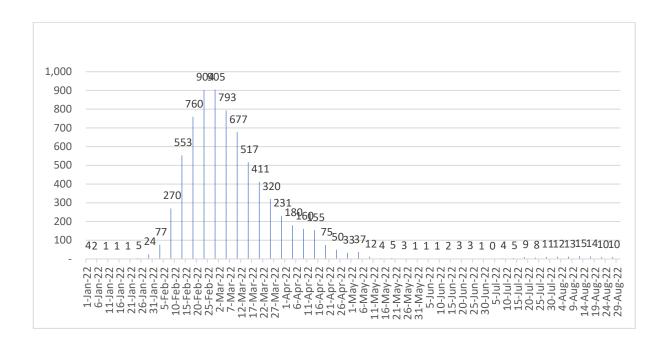




Gambar III. 19(*Update Covid-19 pada tahun 2022 pada website resmi pemkot Surakarta*)

Gambar III. 20(grafik pertambahan jumlah covid-19 per 01 Januari 2021 Dashboard Statistik | Data Covid-19 Kota Surakarta tahun 2021)

berikut data rekapitulasi jumlah penambahan kasus Covid-19 pada 1 januari 2022 - 29 Agustus 2022 yang terdapat pada website Intip.covid.surakarta.go.id menjelaskan, terjadi lonjakan kasus pada akhir januari 2022 dengan puncak kasus Covid per-tanggal 20-25 Februari 2022, total 905 kasus positif Covid-19. Pada 7 maret 2022 mulai terjadi penurunan kasus Covid sampai dengan bulan April 2022. Per-bulan April-agustus 2022 kasus Covid-19 di Kota Surakarta terpantau landai sesuai dengan grafik 1.



Grafik 1 data Lonjakan Kasus Covid-19 Gelombang 3 tahun 2022

2) Mendesiminasikan Informasi terkait Kebijakan Surat Edaran

Pada gelombang ketiga ini Pemerintah Kota Surakarta dalam menekan laju Covid-19 mengeluarkan kebijakan Kebijakan multi sektor yang diperbaharui setiap 15 hari sekali seperti pada gelombang pertama dan kedua, kebijakan yang ditetapkan Satgas Covid-19 Kota Surakarta kemudian diinformasikan kepada masyarakat melalui beberapa platform seperti akun Instagram Resmi Pemkot_Solo seperti pada gambar III.21 yang menjelaskan mengenai peraturan yang mengatur pada sektor Pendidikan, sektor esensial dan non esensial, sektor kritial, pelaksanaan kompetisi olahraga pada saat itu sedang dilaksanakan Asean Para Games 2022, pelaksanaan keagamaan dan seni, pelaksanaan pernikahan, pelaksanaan pasar tradisional, dan lainlain, serta website resmi Surakarta.go.id seperti pada gambar

III.21 DAN Gambar III.22 (Source lengkap SE Walikota terkait Covid-19 <u>Bagian</u> Organisasi Sekretariat daerah (surakarta.go.id)).



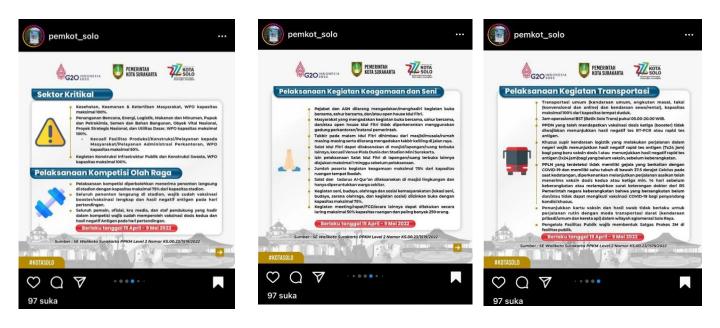




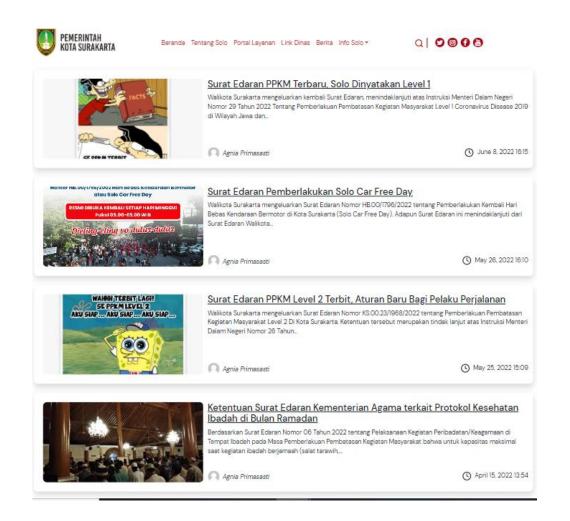








Gambar III. 21 (contoh kebijakan SE Nomor KS.00.23/1519/2022 (PPKM Level 2)



Gambar III. 22 (desiminasikan kebijakan mengenai PPKM 2022)

Tedapat 19 kebijakan daerah yang diterbitkan pada bulan januari hingga Agustus 2022 terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Kota Surakarta. Kebijakan pertama diterbitkan pada tangal 17 Januari 2021 dan di*upload* oleh Humas Pemkot Surakarta melalui akun Instagram resminya mengenai *Update* Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk pengendalian penyebaran COVID-19 dan kebijakan 29 Agustus tahun 2022 mengenai perpanjang PPKM Level 1 COVID-19 yaitu Surat Edaran Nomor KS.00.23/3206/2022. (Data Lengkap *terlampir*)

d) Kendala Pelaksanaan Strategi dalam penanganan Covid-19

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Prokompim Kota Surakarta menjelaskan bahwa cara meyakinkan dan mensosialisasikan kebijakan dalam mengatur lonjakan Covid-19 di Kota Surakarta sangat sulit, dikarenakan tidak semua masyarakat menyadari pentingnya menjaga protokol kesehatan dan pelaksanaan Vaksinasi untuk menjaga diri sendiri dan orang lain di sekitarnya.

"tidak semua masyarakat itu sadar akan pentingnya menjaga protokol dan pentingnya vaksinasi untuk melindungi saya dan orang lain. Kadang yang dipikirin adalah saya baik-baik saja tidak butuh vaksinasi tapi dia lupa ada orang lain yang butuh keamanan kalau kita vaksin dan prokes gitu lo." (Hasil wawancara dengan Wahyu Kristina, SS, MM Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan daerah Kota Surakarta pada tanggal 02 Agustus 2022 pukul 13.15)

Kendala apapun yang dihadapi Pemerintah Kota Surakarta Khususnya Prokompim menjadi tantangan sendiri mengenai memikirkan berbagai cara dan strategi untuk membuat seluruh masyarakat kota Surakarta patuh pada aturan kebijakan yang dibuat oleh Walikota Surakarta, dengan cara bekerjasama dengan

stakeholder dari lembaga pemerintahan, dan lembaga pers untuk bekerjasama mendorong edukasi dan sosialisasi mengenai Vaksinasi.

"jadi dengan berbagai cara sosialisasi, dan bantuan media yang paling penting. Tapi sejauh ini media sangat mendukung kita. Strateginya kayak memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dan membagi jobdesk untuk vaksinasi itu kerjasama. Misal DKK berkerjasama dengan humas memberikan jadwal perihal lokasi center vaksinasi dimana dan jamnya, caranya bagaimana, atau hanya untuk KTP Surakarta atau seluruh masyarakat seperti itu. yang kita perlu sampaikan ke DKK untuk disampaikan ke media, lalu (dari media pers) akan disampaikan kepada masyarakat." (Hasil wawancara dengan Wahyu Kristina, SS, MM Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan daerah Kota Surakarta pada tanggal 02 Agustus 2022 pukul 13.15)

C. Analisis Hasil Penelitian

Dalam bagian ini, peneliti menjelaskan mengenai analisis data dan hasil penelitian mengenai Evaluasi Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Surakarta Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini didapatkan menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam wawancara kelompok dan observasi.

Hasil Evaluasi pada Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Surakarta dalam Penanganan Pandemi Covid-19

a. Audit Humas pada lembaga Protokol Komunikasi Pimpinan Kota Surakarta dalam membantu Pemerintah Kota Surakarta menangani Covid-19 pada proses memahami tujuan dan hakekat Komunikasi

Setiap kegiatan komunikasi pasti memiliki tujuan atau goals yang ingin dicapai oleh pelaksana, dan dalam program ini adalah humas yang menjadi pelaksananya. Pada tahap ini menurut Andrea Hardjana dalam bukunya "audit Komunikasi Teori dan Praktek" dapat diartikan sebagai rancangan awal dari sebuah kegiatan atau program komunikasi yang

kemudian dijadikan pedoman acuan dalam proses pelaksanaan kegiatan komunikasi. Dikarenakan dengan mengetahui petunjuk dan hakekat komunikasi merupakan perangkat penting tentang bagaimana manajemen dapat memanfaatkan kegiatan komunikasi untuk menggerakan organisasi untuk mencapai sasaran yang ditentukan. (Hardjana, 2000)

Pada tahap ini Teknik yang dilakukan peneliti dalam melaksanakan evaluasi Strategi Komunikasi humas pemkot Surakarta dalam penanganan Covid-19 dengan menganalisis data yang ada dengan mengelompokkan data berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Jika melihat hasil wawancara dari kepala Protokol dan Komunikasi pimpinan sekretariat daerah kota Surakarta, Kepala bagian Dokumentasi dan Staf Protokol dan Komunikasi pimpinan sekretariat daerah Kota Surakarta yang dipaparkan dan dibandingkan dengan hasil dokumentasi, peneliti menilai bahwa tujuan Humas Pemkot Surakarta dalam Penangan Covid-19 memiliki persepsi yang sama mengenai Tujuan dan Hakekat Komunikasi Kegiatan tersebut yaitu tujuan Humas dalam membantu penangan Covid-19 sesuai dengan tujuan komunikasi lembaga Pemerintah Kota Surakarta agar Covid-19 dapat dikendalikan Dengan cara menyebarkan informasi kebijakan kepada masyarakat Surakarta.

 b. Audit Humas pada lembaga Protokol Komunikasi Pimpinan Kota Surakarta dalam membantu Pemerintah Kota Surakarta menangani Covid-19 pada proses Menentukan rancangan dan prosedur kegiatan (metode)

Berjalannya suatu kegiatan program komunikasi agar sesuai dengan tujuan haruslah memiliki perencanaan atau kerangka kerja sebagai acuan sebelum melaksanakan kegiatan tersebut. Maka, dibuatlah perencanaan kegiatan yang matang agar kegiatan tersebut sesuai dengan perencaan awal di kerangka kerja yang didalamnya termasuk kedalam rancangan strategi, media dan konten sehingga besar kemungkinan tujuan dari kegiatan tersebut akan mudah tercapai.

Jika melihat semua jawaban yang dipaparkan oleh para informan dan observasi lapangan, peneliti menilai bahwa dalam menentukan rancangan dan prosedur mengenai penangan Covid-19 di Kota Surakarta memiliki presepsi yang sama antara satu narasumber dengan narasumber lainnya. Hasil wawancara tersebut sesuai dengan Kebijakan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 442.05/99.2 Tahun 2020 mengenai susunan satuan tugas penanganan Covid-19 Kota surakarta, pada bagian ini Protokol dan komunikasi daerah kota surakarta termasuk kedalam bidang komunikasi publik yang sesuai dengan tugas "mendesiminasikan informasi publik yang diterima dari satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Surakarta"

Pada pemilihan konten dan media, pada penggunaan media sosial berdasarkan hasil wawancara dengan observasi dapat disimpulkan bahwa humas pemerintah kota Surakarta dalam melakukan Update mengenai Covid-19 di media sosial hanya dilakukan apabila kondisi Covid-19 sedang naik, namun saat jumlah kasus melandai humas pemkot jarang melakukan update mengenai informasi faktual terkait berita maupun update kasus Covid-19. dilihat dari tanggal Update di Instagram dan jumlah kasus Covid.

Pada kegiatan media relation yang dilakukan Humas Prokompim dalam pelaksanaannya untuk memberikan informasi mengenai kebijakan SE walikota dalam penangan Covid-19, Humas pemerintah dalam melakukan strategi komunikasi cukup efektif yaitu ketika Prokompim melakukan peliputan mengenai Rapat Koordinasi yang menghasilkan pembaharuan kebijakan, humas pemkot Surakarta langsung mengunggah hasil press release pada grup WhatsApp sehingga menghasilkan berita mengenai kebijakan yang faktual

c. Audit Humas pada lembaga Protokol Komunikasi Pimpinan Kota Surakarta dalam membantu Pemerintah Kota Surakarta menangani Covid-19 pada proses Menetapkan petunjuk pelaksanaaan dan standar kinerja yang dianggap memenuhi syarat sebagai tolok ukur keberhasilan

Pada tahapan ini peneliti melihat mengenai petunjuk pelaksanaan Strategi yang dilakukan Prokompim dalam melakukan penanganan Covid-19 dan Standar kinerja yang dilakukan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Surakarta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan strategi yang dilakukan, yang diukur pada tahapan ini yaitu

mengenai penetapan sasaran, merumuskan strategi untuk mencapai target sasaran, dan menetapkan standar keberhasilan

Berdasarkan Hasil wawancara dengan informan, dapat diambil kesimpulan menganai sasaran strategi dalam penanganan Covid-19 yaitu seluruh masyarakat Kota Surakarta, dan indikator keberhasilan strategi humas dalam penanganan Covid-19 yaitu masyarakat Kota Surakarta dapat mengetahui informasi mengenai pembaharuan kebijakan dari Walikota Surakarta yang diperbaharui sesuai dengan tujuan komunikasi lembaga .

Penetapan pelaksanaan atau strategi dalam penanganan Covid-19 ditujukan untuk mencapai tujuan atau sasaran awal organisasi. Pada penelitian kali ini tujuan awal Protokol Komunikasi dan Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Surakarta dalam penanganan Covid-19 yaitu untuk menekan penyebaran laju Covid-19, sehingga Prokompim memerlukan strategi yang dianggap memenuhi standar keberhasilan lembaga dengan melakukan sosialisasi kebijakan secara virtual.

Penetapan strategi tersebut melihat situasi dan kondisi Covid-19 di Kota Surakarta. Pada gelombang pertama kasus Covid-19 di kota Surakarta yang merupakan kasus pertama dihadapi oleh humas Pemerintah Kota Surakarta dapat dikatakan kurang sesuai dengan tujuan dan tolok ukur keberhasilan, dikarenakan semua informasi mengenai kenaikan jumlah kasus covid-19 dan pembaharuan kebijakan tidak di upload secara rutin, dibuktikan dengan tabel I pada lampiran I menunjukan bahwa tidak ada update mengenai jumlah kasus Covid-19 dari tanggal 1-16 juni 2020, dan

update di Instagram pemkot Surakarta hanya sampai bulan juli saja. Pada lampiran 2 tabel 2 menunjukan tidak ada data mengenai pembaharuan kebijakan yang dilakukan rutin setiap 15 hari pada bulan Mei dan Juni 2020.

Pada gelombang kedua dan ketiga kasus Covid-19, Pemerintah Kota Surakarta sudah memiliki website resmi untuk update penambahan kasus Covid-19, penanganan kasus juga lebih efisien dengan adanya bantuan dari Dinas Komunikasi dan Informasi dalam mengelola website intip.covid.ac.id.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya dan data dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, pada proses memahami tujuan dan hakekat komunikasi (strategi komunikasi dalam menentukan tujuan) secara garis besar sudah sesuai dengan tujuan komunikasi lembaga, Selanjutnya, pada proses menentukan rancangan dan prosedur kegiatan sesuai dengan tujuan awal yang berpedoman pada Keputusan Walikota Surakarta Nomor 443.05/99.2 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease dengan media yang dipilih adalah media sosial dan media konvensional baik koran maupun website berita. Pada proses menetapkan petunjuk pelaksanaan kurang sesuai dengan tolok ukur dan tujuan komunikasi lembaga, dikarenakan strategi yang dilakukan humas pemkot pada gelombang pertama dikatakan tidak sesuai dengan tujuan dan tolok ukur keberhasilan, Sedangkan pada gelombang kedua dan ketiga dengan adanya penguatan sistem terkait website resmi khusus update mengenai kasus Covid-19, strategi humas pemkot dikatakan sesuai dengan tujuan Komunikasi,

Sehingga dalam penelitian ini penulis dapat diambil kesimpulan Audit strategi komunikasi Prokompim Kota Surakarta dalam penanganan Covid-19 kurang efektif. meskipun dalam penentuan tujuan, media, pesan, khalayak, dan metode yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan komunikasi namun dalam pelaksanaan di lapangan prokompim melakukan Update mengenai kebijakan dan penambahan

kasus, dan Sosialisasi Edukasi mengenai penangan Covid-19 hanya dilakukan secara rutin jika terjadi penambahan kasus Covid-19 tinggi.

B. Saran

Adapun saran dari penulis untuk Humas Protokol dan Komunikasi Sekretariat daerah kota Surakarta yaitu:

- Humas Prokompin perlu memaksimalkan lagi strategi-strategi kehumasan untuk menyempurnakan strategi yang sudah ada dan memperjelas alur atau SOP terutama mengenai strategi media relation yang akan dilaksanakan dalam suatu kegiatan antisipasi wabah agar proses dalam melaksanakan strategi lebih efektif dan efisien.
- Kepada seluruh staff prokompim kota Surakarta perlu memaksimalkan komunikasi yang lebih efektif sehingga tidak terjadi miss-communication terhadap Media Pers atau Stakeholder lain yang berkerjasama dengan Humas prokompim

DAFTAR PUSTAKA

- Andhika, F. (2021). Efektivitas Komunikasi Risiko Covid-19 oleh Pemerintah. Journal of Govertnance Innovation, 3, 119–129.
- ANTARA News. Wali Kota Surakarta: Karantina Khusus Berlaku Bagi Pemudik.

 diakses 16 Juli 2022. Tersedia pada:
 www.antaranews.com/berita/1890108/wali-kota-surakarta-karantinakhusus-berlaku-bagi-pemudik
- Arifin, Anwar. (1994). Strategi Komunikasi: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. PT Rineka Cipta.
- Glinka, T. (2008). Metode Penelitian Sosial. Penerbit Gawe Buku.
- Halim. (2015). Analisis dan evaluasi strategi bersaing dalam upaya peningkatan volume penjualan sepeda motor Honda di wilayah Sumatera Utara. Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 5(2), 1–18.
- Hardjana, A. (2000). Audit Komunikasi. PT. Grasindo.
- Kede, A. (2021). *Analisis manajemen Humas Dalam Penanganan Covid-19. Ilmu Komunikasi*, 04. https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/JEP/index
- Kompas.com. Cegah Penularan Covid-19, Pemkot Surakarta Wajibkan Pelaku Usaha Kirim Proposal. diakses 20 Juli 2022 Tersedia pada: nasional.kompas.com/read/2020/06/30/22190451/cegah-penularan-covid-19-pemkot-surakarta-wajibkan-pelaku-usaha-kirim
- Kompas.com. *Solo Terapkan PPKM Darurat Mulai 3 Juli, Gibran: Warga Tak Perlu Panik* Halaman all diakses pada 26 juli 2022. Tersedia pada: /regional.kompas.com/read/2021/07/01/203604878/solo-terapkan-ppkm-darurat-mulai-3-juli-gibran-warga-tak-perlu-panik?page=all
- Kompas.i. Update Penambahan Kasus Harian Covid-19 di Kota Surakarta Penambahan Kasus Harian Covid-19 di Kota Surakarta Mulai Melandai -.

- diakses 20 Juli 2022. Tersedia pada: www.kompas.id/baca/nusantara/2021/08/03/penambahan-kasus-positif-covid-19-harian-di-kota-surakarta-mulai-melandai
- Kompas.com. *Wali Kota Solo Sebut Pencegahan Tertular Virus Corona Tak Berat Dilakukan*. diakses 20 juli 2022. Tersedia pada: regional.kompas.com/read/2020/03/13/20332721/wali-kota-solo-sebut-pencegahan-tertular-virus-corona-tak-berat-dilakukan
- Kompas.com. Penetapan Kota Surakarta sebagai Kejadian Luar Biasa, Sumber: Solo Ditetapkan KLB Corona, Wali Kota Sebut Itu Bentuk Keseriusan Pemerintah. diakes 16 Juli 2022. Tersedia pada: regional.kontan.co.id/news/wali-kota-tetapkan-solo-kejadian-luar-biasa-klb-virus-corona
- Kontan.co.id. Sosialisasi Vaksinasi, source Ini lokasi dan jadwal vaksinasi Covid-19 di Solo untuk sore dan malam hari . diakses pada 26 juli 2022. Tersedia pada: regional.kontan.co.id/news/ini-lokasi-dan-jadwal-vaksinasi-covid-19-di-solo-untuk-sore-dan-malam-hari?page=all
- Mardiyah, S. L., & Salma, A. N. (2021). Strategi Komunikasi Krisis Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. EProceedings ..., 8(5), 7624–7635. https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/managemen t/article/view/16595
- Maylasari, H. (2022). Komunikasi Krisis Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 di Kota Semarang. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(4), 2074–2083. https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1010
- Mohammed, R., & Bungin, B. (2015). Audit Komunikasi (pendekatan dan metode asesmen sistem informasi dan komunikasi dalam organisasi). prenada media.
- Ruslan, R. (2008). Manajemen Public Relation Dan Media Komunikasi: Konsepsi

- Dan Aplikasi (Revised Ed).
- Sari, F. P., & Nugrahani, R. U. (2019). Strategi Tata Kelola Komunikasi Krisis Humas Pemerintahan Kabupaten Kuningan Jawa Barat dalam Menghadapi Krisis. CHANNEL: Jurnal Komunikasi, 7(2), 89. https://doi.org/10.12928/channel.v7i2.8504
- Silviani, I. (2019). Komunikasi Organisasi. Scopindo media pustaka.
- Simamora, P. (2021). Komunikasi Organisasi. Yayasan Kita Menulis.
- Surakarta.go.id. Rapat Koordinasi percepatan penganan Covid-19 terkait pemberlakuan PPKM mikro darurat pada tanggal 3-20 Juli 2021, diakses pada 26 juli 2022. Sumber: surakarta.go.id/?p=20191
- Surakarta.go.id. Tentang Solo. (diakses pada 21 April 2022) Tersedia pada: surakarta.go.id/?page_id=25548
- Tuwu, D., & Kendari, K. (2020). *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. 3(2), 267–278. https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535
- Uchjana, O. (1998). *Hubungan Masyarakat* (Tjun Surjaman (ed.)). PT. remaja rosdakarya.
- Umaroh, A. K., Mustahziyin, C. K., Lestari, P. B., Kevaladandra, Z., & Pratomo, D. H. (2021). *Review Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Kota Surakarta Dengan Pendekatan Segitiga Kebijakan Dan Analisis Swot. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 10(01), 29–40. https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/60496
- Yanuaria, L. W. (2012). Strategi Pt. Kereta Api Indonesia (Kai) Dalam Meningkatkan Pelayanan Transportasi Kereta Api Studi Kasus Di Kantor Daerah Operasi Vii Madiun Periode Periode 2009-2011.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (I. Fahmi (ed.)). Kencana.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Table 1 penambahan Jumlah kasus Covid-19 di akun Instagram resmi Pemkot_Surakarta pada periode Maret-Juli 2020

	(Instagram: Pemkot_Solo)
Tanggal	Jumlah Kasus Covid-19 (Per-orang)
7 April 2020	5
8 April 2020	5
0 April 2022	5
1 April 2020	5
2 April 2020	5
3 April 2020	5
4 April 2020	5
5 April 2020	5
6 April 2020	8
7 April 2020	8
8 April 2020	9
9 April 2020	9
0 April 2020	10
1 April 2020	12
2 April 2020	13
3 April 2020	15
4 April 2020	16
5 April 2020	17

26 April 2020	17
27 April 2020	18
28 April 2020	18
29 April 2020	22
30 April 2020	22
01 May 2020	22
02 May 2020	22
03 May 2020	22
04 May 2020	23
05 May 2020	23
06 May 2020	23
07 May 2020	25
08 May 2020	25
09 May 2020	25
10 May 2020	27
11 May 2020	27
12 May 2020	27
13 May 2020	27
14 May 2020	27
15 May 2020	27
16 May 2020	27
17 May 2020	29
18 May 2020	29
L	

19 May 2020	29
20 May 2020	29
21 May 2020	29
22 May 2020	29
23 May 2020	29
24 May 2020	29
25 May 2020	29
26 May 2020	33
27 May 2020	33
28 May 2020	33
29 May 2020	33
30 May 2020	33
31 May 2020	34
01 June 2020	-
02 June 2020	-
03 June 2020	-
04 June 2020	-
05 June 2020	-
06 June 2020	-
07 June 2020	-
08 June 2020	-
09 June 2020	-
10 June 2020	-

11 June 2020	-
12 June 2020	-
13 June 2020	-
14 June 2020	-
15 June 2020	-
16 June 2020	-
17 June 2020	37
18 June 2020	38
19 June 2020	38
20 June 2020	38
21 June 2020	39
22 June 2020	-
23 June 2020	41
24 June 2020	-
25 June 2020	42
26 June 2020	42
27 June 2020	-
28 June 2020	42
29 June 2020	42
30 June 2020	42
01 July 2020	42
02 July 2020	43
03 July 2020	-
	<u>I</u>

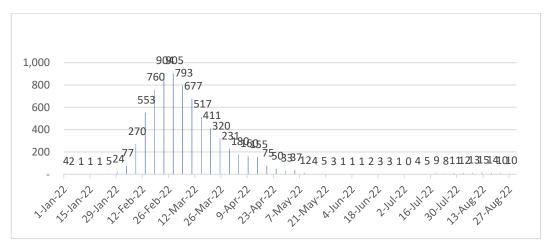
04 July 2020	-
05 July 2020	43
06 July 2020	-
07 July 2020	43
08 July 2020	-
09 July 2020	43
10 July 2020	-
11 July 2020	45
12 July 2020	63
13 July 2020	64
14 July 2020	71
15 July 2020	100
16 July 2020	-
17 July 2020	-
18 July 2020	-
19 July 2020	190
20 July 2020	214

Penambahan Jumlah kasus Covid-19 di akun Instagram resmi Pemkot_Surakarta pada periode juni-desember 2021



Gambar I. 2 Grafik Penambahan jumlah kasus Covid-19 tahun 2021

Penambahan jumlah kasus Covid-19 tahun 2022 (Januari-Agustus)



Gambar I. 3 Grafik Penambahan jumlah kasus Covid-19 tahun 2021

Lampiran 2

Table 2 Daftar kebijakan Kota Surakarta periode Maret hingga Desember 2020

Kebijakan Walikota Tahun 2020 Dalam penanganan COVID-19 (Instagram: Pemkot_Solo)				n: Pemkot_Solo)	
	nggal rbit	Masa Berlaku	Tanggal Upload IG	Judul Kegiatan	Referensi
04 2020	Maret	hingga terbit kebiajakan lebih lanjut	10 Maret 2020	kesiapan menghadapi Corona Virus Disease	SE Walikota No.443.26/581 tahun 2020
13 2020	Maret	Sampai Walikota mencabut penetapan KLB COVID-19	14 Maret 2020	penetapan status kejadian luar biasa COVID-19 di kota Surakarta	Surat Keputusan Nomor 443/7628 Tahun 2020
13 2020	Maret		14 Maret 2020	Kebijakan pemerintah Kota Surakarta menghadapi COVID-19	Surat Edaran Nomor 441.1/668 Tahun 2020
14 2020	Maret	30 Maret 2020	14 Maret 2020	kesigapan dan pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan	Surat Edaran Nomor 443.26/489 Tahun 2020
24 2020	Maret	29 Maret 2020	24 Maret 2020	jam operasional, tempat hiburan, pusat perbelanjaan/ mall, mall retail, pasar modern, pusat kuliner, gedung pertemuan dan hotel dalam hal tindak lanjut penyebaran COVID-19 di Kota Surakarta	Surat Edaran Nomor 510/708 Tahun 2020
26 2020	Maret	13 April 2020	26 Maret 2020	Pelaksanaan Layanan pendidikan dalam pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan Kota Surakarta	Surat Edaran Nomor 443.26/531 Tahun 2020

26 Maret 2020	Sampai Walikota mencabut penetapan KLB COVID-19	26 Maret 2020	Pembatasan Aktivitas pertemuan warga terkait pencegahan penyebaran COVID-19	Surat Edaran Nomor 443.76/718 Tahun 2020
30 Maret 2020		30 Maret 2020	Gugus Tugas Percepat penanganan Covid	Surat Edaran Nomor 443.26/531 Tahun 2020
30 Maret 2020	12 April 2020	30 Maret 2020	petunjuk teknis perpanjangan pelaksanaan sistem kerja aparatur negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan pemerintah kota surakarta	Surat Edaran Nomor 061.1/725 Tahun 2020
30 Maret 2020	12 April 2020	-	Perpanjangan Pembatasan Jam Operasional Tempat Hiburan Pusat Perbelanjaan/Mall, Mall Retail, Pasar Modern, Pusat Kuliner, Gedung Pertemuan, dan Hotel dalam Hal Tindak Lanjut Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Surakarta	Surat Edaran Nomor 510/726 Tahun 2020
01 April 2020	21 April 2020	20 Mei 2020	Perpanjangan Peniadaan Sementara Kegiatan Peribadatan dan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (COVID-19)	Imbauan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Nomor 847 Tahun 2020
03 April 2020	Sampai Walikota mencabut penetapan KLB COVID-19	08 April 2020	Pemakaian Masker Non Media	Surat Edaran Nomor 440.758 Tahun 2020

07 April 2020	21 April 2020	-	Perubahan atas Surat Edaran Nomor 061.1/725 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19) di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	Surat Edaran Nomor 440.1/760 Tahun 2020
08 April 2020		-	Tetap Belajar di Rumah	Surat Edaran Nomor 800/767 Tahun 2020
09 April 2020	30 April 2020		Perpanjang kedua Pembatasan Jam operasional tempat hiburan pusat perbelanjaan/mall, mall retail, pasar modern, pusat kuliner, gedung pertemuan dan hotell dalam hal tindak lanjut penyebaran COVID-19 di kota surakarta	Surat Edaran Nomor 510/792 Tahun 2020
09 April 2020		-	evaluasi pelaksanaan belajar di rumah dan penilaian kelulusan atau kenaikan kelas bagi siswa didik di lingkungan satuan pendidikan kota surakarta	Surat Edaran Nomor 420/569 Tahun 2020

10 April 2020	sampai ditetapkan kebijakan lebih lanjut	-	pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan kehiatan mudik atau cuti bagi ASN di lingkunga pemerintah kota surakarta	Surat Edaran Nomor 850/809 Tahun 2020
11 April 2020	13 Mei 2020	-	perubaha kedua atas Surat edara Nomor 061.1/725 tentang petunjuk teknis perpanjang pelaksanaan sistem kerja ASN dalam upaya pencegahan COVID-19	Surat Edaran Nomor 061.1/840 Tahun 2020
12 April 2020	15 Mei 2020	-	perpanjang ketiga pembatasan jam operasional tempat hiburan pusat perbelajaan/mall, mall retail pasar modern pusat kuliner gedung pertemuan dan Hotel dalam hal tindak lanjut penyebaran COVID-19	Surat Edaran Nomor 440/876 Tahun 2020
13 April 2020	29 Mei 2020	-	perubahan ketiga atas surat edaran Nomor 061.1/725 tentang petunjuk teknis perpanjangan pelaksanaan sistem kerja ASN dalam upaya pencegahan COVID-19	Surat Edaran Nomor 061.1/930 Tahun 2020
14 April 2020	29 Mei 2020	13 Mei 2020	perpanjang keempat pembatasan jam operasional tempat hiburan pusat perbelajaan/mall, mall retail pasar modern pusat kuliner gedung pertemuan dan Hotel dalam hal tindak lanjut penyebaran COVID-19	Surat Edaran Nomor 440.1/925 Tahun 2020

28 Mei 2020	2 Juni 2020	28 Mei 2020	perubahan keempat atas surat edaran Nomor 061.1/725 tentang petunjuk teknis perpanjangan pelaksanaan sistem kerja ASN dalam upaya pencegahan COVID-19	Surat Edaran Nomor061.1/378 Tahun 2020
08 Juni 2020		8 Juni 2020	Pedoman teknis pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kota Surakarta	Surat Edaran Nomor 067/1078 Tahun 2020
19 Juni 2020	7 Juli 2020	-	Perubahan atas pedoman teknis pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kota Surakarta	Surat Edaran Nomor 067/1165 Tahun 2020
10 Juli 2020		10 Juli 2020	Pelaksanaan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 pada satuan pendidikan di wilayah kota Surakarta	Surat Edaran Nomor 422.3/1237 Tahun 2020
13 Juli 2020	20 Juli 2020	13 Juli 2020	Penutupan sementara Waktu Operasional Pasar Harjodaksino	Surat Edaran Nomor 511.2/1348 Tahun 2020
16 September 2020	28 September 2020	16 September 2020	penerapan kedisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan COVID-19	Surat Edaran Nomor 067/1012 Tahun 2020

18 September 2020		18 September 2020	penerapan sanksi bagi perorangan dalam rangka penerapan kedisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan COVID-19	Surat Edaran Nomor 440.1/2062 Tahun 2020
28 September 2020		29 September 2020	penerapan kedisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan COVID-19	Surat Edaran Nomor 067/2183 Tahun 2020
13 Oktober 2020	26 Oktober 2020	13 Oktober 2020	penerapan kedisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan COVID-19	Surat Edaran Nomor 067/2386 Tahun 2020
11 Desember 2020	19 Desember 2020	11 Desember 2020	penerapan kedisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan COVID-19	Surat Edaran Nomor 067/3119 Tahun 2020
16 Desember 2020		17 Desember 2020	Antisipasi terkait peningkatan COVID-19 Libur Nataru	Surat Edaran Gubernur Jawa tengah Nomor 445/00017480

Table 3 Daftar kebijakan Kota Surakarta Periode Januari-Desember 2021

Kebijakan Walikota Tahun 2021 Dalam Menghadapi COVID-19 (Instagram: Pemkot_Solo)

Kebijakan w					
Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Tanggal Upload IG	Judul Kegiatan	Referensi	
08 Januari 2021	25 Januari 2021	8 Januari 2021	Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk pengendalian penyebaran COVID-19	Surat Edaran Nomor 067/036 Tahun 2020	
11 Januari 2021	25 Januari 2021	11 Januari 2021	Prubahan atas Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) nomor atas untuk pengendalian penyebaran COVID-19	Surat Edaran Nomor 067/057 Tahun 2020	
22 Januari 2021	26 Januari 2021- 08 Februari 2021	23 Januari 2021	perpanjangan pemberlakuan PPKM	instruksi mentri dalam negeri nomor 02 tahun 2021	
25 Januari 2021	26 Januari 2021- 08 Februari 2021	25 Januari 2021	perpanjangan pemberlakuan PPKM	Surat Edaran Nomor 067/136	
4 Februari 2021	08 Februari 2021	4 Februari 2021	peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di kota surakarta dalam rangka "Gerakan Jateng di Rumah saja"	Surat Edaran Nomor 067/258	
8 Februari 2021	9-22 Februari 2021	8 Februari 2021	PPKM berbasis Mikro	Surat Edaran Nomor 067/295	
22 Februari 2021	23 Februari 2021- 08 Maret 2021	23 Februari 2021	PPKM berbasis Mikro dan optimalisasi peran satgas keluarahan dalam pengendalian COVID- 19	Surat Edaran Nomor 067/495	
9 Maret 2021	9- 22 Maret 2021	10 Maret 2021	PPKM berbasis Mikro	Surat Edaran Nomor 067/665	
3 Mei 2021	6-17 Mei 2021	7 Mei 2021	PPKM berbasis Mikro tentang peniadaan Mudik 2021	Surat Edaran Nomor 067/1309	
2 Juli 2021	3-20 Juli 2021	3 Juli 2021	PPKM Darurat Kota Surakarta	Surat Edaran Nomor 067/2083	

3 Juli 2021	4-20 Juli 2021	3 Juli 2021	penutupan 13 pasar tematik di kota surakarta	instruksi dalam negeri nomor 15 tahun 2021
12 Juli 2021	20 Juli 2021	14 Juli 2021	perubahan PPKM darurat COVID-19 Surat Edaran Nomor 067/2083	Surat Edaran Nomor 067/2189
21 Juli 2021	25 Juli 2021	21 Juli 2021	PPKM Level 4 COVID- 19	Surat Edaran Nomor 067/2236
26 Juli 2021	2 Agustus 2021	27 Juli 2021	PPKM Level 4 COVID- 19	Surat Edaran Nomor 067/2284
2 Agustus 2021	9 Agustus 2021	3 Agustus 2021	PPKM Level 4 COVID- 19	Surat Edaran Nomor 067/2377
10 Agustus 2021	16 Agustus 2021	11 Agustus 2021	PPKM Level 4 COVID- 19	Surat Edaran Nomor 067/2478
17 Agustus 2021	23 Agustus 2021	18 Agustus 2021	PPKM Level 4 COVID- 19	Surat Edaran Nomor 067/2567
24 Agustus 2021	30 Agustus 2021	24 Agustus 2021	PPKM Level 4 COVID- 19	Surat Edaran Nomor 067/2613
31 Agustus2021	06 September 2021	31 Agustus 2021	PPKM Level 3 COVID- 19	Surat Edaran Nomor 067/2685
07 September 2021	13 September 2021	07 September 2021	PPKM Level 3 COVID- 19	Surat Edaran Nomor 067/2777
14 September 2021	20 September 2021	15 September 2021	PPKM Level 3 COVID- 19	Surat Edaran Nomor 067/2899
21 September 2021	4 Oktober 2021	22 September 2021	PPKM Level 3 COVID- 19	Surat Edaran Nomor 067/3028
5 Oktober 2021	18 Oktober 2021	6 Oktober 2021	PPKM Level 2 COVID- 19	Surat Edaran Nomor 067/3272
19 Oktober 2021	01 November 2021	-	PPKM Level 2 COVID- 19	Surat Edaran Nomor 067/3592
02 November 2021	15 November 2021	03 November 2021	PPKM Level 2 COVID- 19	Surat Edaran Nomor 067/3796
16 November 2021	29 November 2021	17 November 2021	PPKM Level 2 COVID- 19	Surat Edaran Nomor 067/4061
30 November 2021	13 Desember 2021	-	PPKM Level 2 Nataru	Surat Edaran Nomor 067/4619

14 2021	Desember	3 Januari 2022	16 Desember 2021	perpanjang PPKM Level 2 COVID-19 Nataru	Surat Edaran Nomor 067/4904
------------	----------	----------------	------------------	--	-----------------------------------

Table 4 Daftar kebijakan Kota Surakarta Periode Januari-Agustus 2022

Kebijakan Walikota Tahun 2022 Dalam Menghadapi COVID-19 (Instagram: Pemkot_Solo)				
Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Tanggal Upload IG	Judul Kegiatan	Referensi
4 Januari 2022	17 Januari 2022	-	PPKM Level 2	Surat Edaran Nomor KS.00/010/2022
18 Januari 2022	24 Januari 2022	-	PPKM Level 2	Surat Edaran Nomor KS.00.23/198/2022
25 Januari 2022	31 Januari 2022	-	PPKM Level 2	Surat Edaran Nomor KS.00.23/292/2022
31 Januari 2022	1-7 Februari 2022	2 Februari 2022	PPKM Level 2	Surat Edaran Nomor KS.00.23/420/2022
8 Februari 2022	8-14 Februari 2022	8 Februari 2022	PPKM Level 2	Surat Edaran Nomor KS.00.23/500/2022
15 Februari 2022	15-21 Februari 2022	17 Februari 2022	PPKM Level 2	Surat Edaran Nomor KS.00.23/607/2022
22 Februari 2022	28 Februari 2022	23 Februari 2022	PPKM Level 3 COVID-19	Surat Edaran Nomor KS.00.23/734/2022
01 Maret 2022	7 Maret 2022	3 Maret 2022	PPKM Level 3 COVID-19	Surat Edaran Nomor KS.00.23/805/2022
08 Maret 2022	14 Maret 2022	9 Maret 2022	PPKM Level 3 COVID-19	Surat Edaran Nomor KS.00.23/892/2022
15 Maret 2022	21 Maret 2022	16 Maret 2022	PPKM Level 3 COVID-19	Surat Edaran Nomor KS.00.23/988/2022
22 Maret 2022	04 April 2022	24 Maret 2022	PPKM Level 3 COVID-19	Surat Edaran Nomor KS.00.23/1086/2022
05 April 2022	18 April 2022	06 April 2022	PPKM Level 2	Surat Edaran Nomor KS.00.23/1353/2022
19 April 2022	9 Mei 2022	20 April 2020	PPKM Level 2	Surat Edaran Nomor KS.00.23/1519/2022
10 Mei 2022	23 Mei 2022	25 Mei 2022	PPKM Level 2	Surat Edaran Nomor KS.00.23/1716/2022
24 Mei 2022	6 Juni 2022	8 Juni 2022	PPKM Level 2	Surat Edaran Nomor KS.00.23/1968/2022
7 Juni 2022	4 Juli 2022	-	PPKM Level 1	Surat Edaran Nomor KS.00.23/2134/2022
5 Juli 2022	1 Agustus 2022	3 Agustus 2022	PPKM Level 1	Surat Edaran Nomor KS.00.23/2618/2022

2 Agustus 2022	15 Agustus 2022	-	PPKM Level 1	Surat Edaran Nomor KS.00.23/3042/2022
16 Agustus 2022	29 Agustus 2022	-	PPKM Level 1	Surat Edaran Nomor KS.00.23/3206/2022

Lampiran 3

Interview Guide

INTERVIEW GUIDE

A. Pedoman Wawancara Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Surakarta

- 1. Bagaimana sejarah prokompim Kota Surakarta?
- 2. Bagaimana struktur bagian humas dalam pemerintahan?
- 3. Apakah Humas Pemkot Surakarta masuk kedalam satgas Covid-19?
- 4. Adakah dokumen tertulis formal maupun non formal yang menjadi landasan dalam merencanakan rancangan kebijakan dalam menekan Covid-19?
- 5. Apakah tupoksi tersebut dijadikan satu-satunya panduan kerja atau humas menyusun program kerja tambahan
- 6. Apakah program kerja yanang humas susun tersebut mendukung program kerja pemerintahan dalam menekan Covid-19?
- 7. Bagaimana cara humas dalam keikutsertaan menyebarkan/mensosialisasikan kebijakan untuk menekan laju Covid-19? Apa indicator keberhasilan humas dalam mencapai targer sasaran ?
- 8. Bagaimana pola komunikasi organisasi yang ada didalam humas pemkot Surakarta dalam satgas Covid-19?
- 9. Apakah media sosial whatsapp efektif mendukung komunikasi antara staf humas pemkot Surakarta?
- 10. Media apa saja yang digunakan humas pemkot dalam menyebarkan informasi kepada public mengenai edukasi covid-19? Berkerja sama dengan stakeholder lain?
- 11. Apakah humas pemkot Surakarta memiliki straegi khusus untuk membangun saluran komunikasi dengan walikota Surakarta terutama dalam hal penanganan covid-19? Apakah bias dikatakan efektif?

12. Kendala apa yang dihadapi Prokompim dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menerapkan Protokol Kesehatan?

B. Pedoman Wawancara Kepala Sub Bagian Dokumentasi Kota Surakarta

- 1. Bagaimana sejarah prokompim Kota Surakarta?
- 2. Apakah Humas Pemkot Surakarta masuk kedalam satgas Covid-19?
- 3. Apakah program kerja yang humas susun tersebut mendukung program kerja pemerintahan dalam menekan Covid-19?
- 4. Apakah humas ikut andil dalam memberikan saran kepada pimpinan?
- 5. Apakah ada program kerja yang prokompim keluarkan khusus dalam membantu pemerintah untuk menangani covid?
- 6. Bagaimana cara humas dalam keikutsertaan menyebarkan/mensosialisasikan kebijakan untuk menekan laju Covid-19?

 Apa indiator keberhasilan humas dalam mencapai targer sasaran ?
- 7. Bagaimana pola komunikasi organisasi yang ada didalam humas pemkot Surakarta dalam satgas Covid-19?
- 8. Apakah media sosial whatsapp efektif mendukung komunikasi antara staf humas pemkot Surakarta?
- 9. Apakah humas pemkot Surakarta memiliki straegi khusus untuk membangun saluran komunikasi dengan walikota Surakarta terutama dalam hal penanganan covid-19? Apakah bias dikatakan efektif?

C. Pedoman Wawancara Staff Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Surakarta

- 1. Adakah dokumen tertulis formal maupun non formal yang menjadi landasan dalam merencanakan rancangan kebijakan dalam menekan Covid-19?
- 2. Apakah tupoksi tersebut dijadikan satu-satunya panduan kerja atau humas menyusun program kerja tambahan?

- 3. Apakah program kerja yang humas susun tersebut mendukung program kerja pemerintahan dalam menekan covid-19?
- 4. Bagaimana cara humas dalam keikutsertaan menentukan kebijakan untuk menekan laju Covid-19? Apa indicator keberhasilan humas dalam mencapai targer sasaran ?
- 5. Bagaimana pola komunikasi organisasi dalam pelaksanaannya?
- 6. Apakah media sosial whatsapp efektif mendukung komunikasi antara staf humas pemkot Surakarta?
- 7. Apakah humas pemkot Surakarta pernah melakukan audit/evaluasi mengenai penanganan covid-19? Bagaimana pelaksanaannya?
- 8. Media apa saja yang digunakan humas pemkot dalam menyebarkan informasi kepada public mengenai edukasi covid-19? Berkerja sama dengan stakeholder lain?

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 1

Hari/Tanggal	02 Agustus 2022
Waktu	13.15
Lokasi	Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta
Informan	Wahyu Kristina, SS, MM
Jabatan	Kepala Bagian Prokompim Periode 2016-2021
Topik	Evaluasi Strategi Komunikasi Humas Dalam Penanganan Covid-19

1. Bagaimana sejarah prokompim Kota Surakarta?

"berdasarkan struktur organisasi, nanti bisa di cek di JDIH ya itu di perwali tentang struktur organisasi tahun 2020. Karna waktu itu sudah berubah dengan yang sekarang, strukturnya udah beda. Ketika saya masih menjabat disana strukturnya sudah berbeda dengan yang sekarang. Bisa di lihat di perwali tahun 2017-2021"

2. Bagaimana struktur bagian humas dalam pemerintahan?

"jadi sebenarnya ketika. Kita sudah menjadi menjadi bagian Prokompim (Protokol dan Komunikasi Pimpinan). Fungsi kehumasan sudah tidak lagi menjadi tugas prokompim fungsi kehumasan sudah di Tarik ke Diskominfo. Prokompim bertugas untuk pelayanan pimpinan, yang menjadi pimpinan yaitu walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah dan staff ahli. Hanya karena waktu itu masih masa transisi dari pengalihan...e.. apa Namanya, fungsi yang semula dipegang oleh humas protokol, kemudian emm.. kemudian sekarang menjadi fungsi yang ada di kominfo, nah ini kita masih mengerjakan tugas yang seharusnya sudah menjadi urusan diskominfo"

3. Apakah Humas Pemkot Surakarta masuk kedalam satgas Covid-19?

"ya... prokompim masuk kedalam satgas Covid-19 sebagai Bidang Komunikasi kalau tidak salah ya.."

4. Adakah dokumen tertulis formal maupun non formal yang menjadi landasan dalam merencanakan rancangan kebijakan dalam menekan Covid-19?

"kalau covid kan kita berdasarkan surat edaran yang setiap kali di terbitkan setiap 2 minggu atau 15 hari sekali muncul surat edaran untuk PPKM ya. Itu sebagai landasan untuk kegiatan baik masyarakat maupun pemerintah atau swasta, itu untuk melakukan kegiatan yang tidak melanggar, eh apa Namanya.. harus sesuai dengan protokol kesehatan yang di cantumkan di PPKM itu, landasannya. Nah fungsi kehumasan adalah mensosialisasikan kebijakan tersebut ke seluruh lap[isan masyarakat. Pernikahan apakah sudah boleh, tatacaranya bagaimana kemudian pengaturan wfh wfo kemudian untuk sekolah. Nah itu disosialisasikan disitu, nah untuk fungsinya humas itu disitu, menyampaikan ke masyarakat, nah itu ada sknya nah sebagai tim satgas covid."

5. Apakah tupoksi tersebut dijadikan satu-satunya panduan kerja atau humas menyusun program kerja tambahan

"kalau humas itu kan punya perwali itu sebagai dasar. Disitu ada tugas pokok fungsi, ada renstra rencana strategis, nah itu sebagai acuan prokompim untuk berkerja, program program disitu, kemudian selain itu ada tugas tambahan karena disitu di item terakhir tertuilis, menjalankan tugas yang diberikan oleh walikota. Nah ini kayak pasal karet kan. Jadi semua tugas bila mana itu dari walikota ya harus kita kerjakan. Kalau secara formal tugas pokok fungsi kita itu sudah ada apa yang harus kita kerjakan"

6. Apakah program kerja yanang humas susun tersebut mendukung program kerja pemerintahan dalam menekan Covid-19?

"ya pasti ya, kalau tujuan utamanya kita adalah bagaimana kebijakan pimpinan itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Ketika masyarakat itu paham dan bisa melakukan kebijakan terkait Dengan covid ya. Sesuai dengan edaran ya itu dianggap sebuah keberhasilan, nah tapi

kalau masih ada yang melanggar nah ini yang salah dimana ni apakah sosialisasinya kurang. Atau memang masyarakatnya itu yang bandel."

7. Bagaimana cara humas dalam keikutsertaan menyebarkan/mensosialisasikan kebijakan untuk menekan laju Covid-19? Apa indicator keberhasilan humas dalam mencapai targer sasaran ?

"tidak hanya prokompim yang menentukan itu tapi tim satgas yang sudah punya pembagian tugas masing-masing, atau jobdesk masing-masing. Yaa Awalnya kita mendapatkan informasi agenda walikota khususnya rapat koordinasi Covid itu dari sespri (sekretaris Pribadi) walikota. Nah dari agenda tersebut kita sebarkan kepada staff, kepada wartawan lewat wa itu.. buat dating ke rapat itu, trs hasil rapatnya dibuat rilis sama staff prokompim. Nah rilisnya itu disebarkan ke wa grupnya lokawarta (pers). Kalau kita punya saluran untuk komunikasi melalui sosial media maupun media kovensional (cetak maupun elektronik). Disebelah kita itu ada lokawarta nah itu saluran komunikasi kita. Jadi mau di sosmed, mau di TV juga ada radio juga ada kemudian media cetak maupun majalah adalah cara kita untuk menyampaikan kebijakan tersebut."

"Kita kan sasarannya masyarakat kota Surakarta ya, ya Indicator keberhasilan itu ya kalau tone beritanya positif, iya kan? Selama saya disana itu positif gak pernah nmegatif. Jangan sampai negative. Nah itu tugas kita. Karena memang menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat berartikan jangan sampai diterima negative oleh masyarakat kan, nah piye carane, nah dengan strategi strategi"

8. Bagaimana pola komunikasi organisasi yang ada didalam humas pemkot Surakarta dalam satgas Covid-19?

Kalau yang saya kerjakan waktu itu, jadi kita kan punya wadah lokawarta, ya kita harapkan setiap informasi dari pemerintah kota itu bisa diterima oleh mida lokjawarta dan kalau mereka ee apanamanya, kita itukan bisa dalam tanda petik "Mengarahkan" kebijakan ini harus sampai masyarakat diterima

dengan positif. Tugas kami meyakinkan kepada lokawarta mengenai berita yang harus diberitakan yang ini yang harus kamu shar yang ini yang harus kamu beritakan seluas-luasnya jangan yang negatifnya, gitu kan. Nah strateginya ya harus membina hubungan baik dengan media itu tadi, mereka butuh informasi, berita kita sediakan, mereka butuh dokumentasi yang mereka tidak bisa akses karna ada jadwal yang bertabrakan ya itu kita berikan. Kalian waktu itui disuruh buat rilis dan dokumentasi kan? Nah harapannya itu yang baik-baik yang di share oleh media, membina media relation, ya kita punya program Namanya gathering, sarpra kita siapkan, di lokawarta ada wifi, computer, laptop, minum, makan sebisa mungkin mereka liputan dimana ya dapat jatah snack. Itu bagian dari bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan media"

9. Apakah media sosial whatsapp efektif mendukung komunikasi antara staf humas pemkot Surakarta?

"iya, so far masi efektif ya jadi kita ada wa grup, ada pers ada apalagi ya satu, lokawarta juga ada, semua media ada digrup itu semua kita share ada agenda pimpinan apa disana jadi semisal ada agenda hari ini, semalem sudah di share ke media, jadi mereka ngerti. Mereka sudah siap ancang-ancang, oh hari ini pak wali menerima tamu dari PT KAI missal oh mereka akan menebak "oh mungkin elevated reil" mereka akan mencari pertanyaan seputar itu. Harapan kita tu seperti itu, kemudian acara evwnt pak wali membuka acara dimana, nah itu sudah tersampaikan sebelumnya"

10. Media apa saja yang digunakan humas pemkot dalam menyebarkan informasi kepada public mengenai edukasi covid-19? Berkerja sama dengan stakeholder lain?

"media sosial media cetak elektronik,tv radio. Banyak sekali itu yang ada di lokawarta radar solo, suara merdeka semua ada. Kalau itu kan dimana ada berita mereka akan dating dengan sendirinya, iyakan?"

11. Apakah humas pemkot Surakarta memiliki straegi khusus untuk membangun saluran komunikasi dengan walikota Surakarta terutama dalam hal penanganan covid-19? Apakah bias dikatakan efektif?

"saluran khusus, khusus yang baimana kita sudah sesuai dengan tupoksi pokoknya. Tugas pokok fungsinya sebagai ee apanamanya.. pelayanan kepada pimpinan salah satu diantarnaya menyampaikan kebijakan dari pimpinan kepada masyarakat. Maupun diinternal pemkot sendiri. Kebijakan salah satunya ya kebijakan penanganan covid, ya otomatis kita memberikan layanan itu apa yang menjadi kebijakan walikota kita teruskan ke masyarakat seperti saya sampaikan sebelumnya dengan berbagai media yang kita kelola. Informasi yang disampaikan melalui surat edaran, wartawan suka dengan doorstop atau wawancara ditempat. Kesempatan untuk doorstop itu bisa atau tidak itu kewenangan sayawaktu itu di prokompim itu saya untuk megnatur. Pakwali menghendaki ada doorstop atau tidak itu diatur oleh saya. Pimpinan nyaman media mendapatkan ifno yang enak. Jangan sampai pimpinan dan wartawan miss komunikasi.

12. Kendala apa yang dihadapi Prokompim dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menerapkan Protokol Kesehatan?

"memang apaya meyakinkan dan mensosialisasikan terus menerus dengan berbagai cara itu penting, ternyata tidak semua masyarakat itu sadar akan pentingnya menjaga protokol dan pentingnya vaksinasi untuk melindungi saya dan orang lain. Kadang yang dipikirin adalah saya baik-baik saja tidak butuh vaksinasi tapi dia lupa ada orang lain yang butuh keamanan kalau kita vaksin dan prokes gitu lo. Nah itu pr sebenarnya bukan hanya prokompin yaitu semua satgas covid untuk mensosialisaskan itu, jadi kalau capaian vaksinasi pertama sama kedua capaiannya sudah hampir 99% tapi kalau booster itu susah banget sampai... jangan kan orang lain asn aja susah, sampai ancamannya kalau ga booster tunjangan kinerjanya itu ga cair, iya seperti itu karna memang membuat masyarakat itu sadar bahwa vaksin itu penting itu tidak semuanya gampang atau bisa menerima, jadi dengan berbagai cara sosialisasi, dan bantuan media yang paling penting. Tapi sejauh ini media sangat mendukung kita. Strateginya kayak memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dan membagi jobdesk untuk vaksinasi itu

sama sama kerjasama. Missal dkk berkerjasama dngan humas memberikan jadwal perihal lokasi center vaksinasi dimana dan jamnya, caranya bagaimana, atau hanya untuk ktp Surakarta atau seluruh masyarakat seperti itu yang kita perlu sampaikan kedkk untuk disampaikan ke media lalu akan disampaikan kepada masyarakat."

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 2

Hari/Tanggal	20 Juli 2022
Waktu	12.34 WIB
Lokasi	Kantor Dinas Sekretariat Daerah Kota Surakarta
Informan	Suroso, S.IP
Jabatan	Kepala Sub bagian Dokumentasi Prokompim periode 2016-2021
Topik	Evaluasi Strategi Komunikasi Humas Dalam Penanganan Covid-19

1. Bagaimana sejarah prokompim Kota Surakarta?

"Perubahan itu berasal dari aturan, sebelumnya (Namanya) itu bagian humas aja trs digabung menjadi bagian humas. Protokol itu sebelumnya bagian umum kemudian digabung menjadi bagian humas dan protokol, kemudian ada perubahan lagi itu kehumasan masuk ke Diskominfo dan humas sendiri difokuskan untuk komunikasi pimpinan, jadi protokol dan komunikasi pimpinan. Terus sekarang itu januari 2022 itu ganti lagi menjadi protokol dan komunikasi pimpinan. Dulu kehumasan itu ada di humas prokol, itu istilahnya yang informasi kota itu kita yang menangani, lalu kominfo itu bertugas hanya untuk branding kota keseluruhan. Kemudian kita (Prokompim) di khususkan untuk pimpinan (walikota, wakil, dan sekda) tapi tetep bantu di kominfo karena baru masa transisi ini loh."

2. Apakah Humas Pemkot Surakarta masuk kedalam satgas Covid-19? "ya, Prokompim itu masuk (satgas covid) bagian komunikasi publik"

3. Apakah program kerja yang humas susun tersebut mendukung program kerja pemerintahan dalam menekan Covid-19?

"kalau mendukung itu pasti ya, karena humas masuk ke (bagian) satgas."

4. Apakah humas ikut andil dalam memberikan saran kepada pimpinan?

"kalau memberikan saran ada sih, masukan-masukan kepada pimpinan ada.. biasanya yang terkait itu terkait ionformasi publikasi ke masyarakat sih. Contohnya ini ya kayak itu, dulu ada missinformasi di masyarakat itu disampaikan contohnya pak sekda,paksekda pernah mengatakan zona hitam itu, padahal zona hitam gaada, nah itu akan meresahkan masyarakat, nah itu dimasukan ke pak kabag, kemudian ke paksekda, lalu pak wali kemudian di klarifikasi"

5. Apakah ada program kerja yang prokompim keluarkan khusus dalam membantu pemerintah untuk menangani covid?

"Istilahnya penyebar luasan informasi, pemberitahuan kayak kampanye gitu, kita (Prokompim) bekerja sama engan stakeholder kayak pasar itu kan mereka minta dibuatkan istilahnya dibuatkan skrip untuk sosialisasi pedagang2 gitu"

6. Bagaimana cara humas dalam keikutsertaan menyebarkan/mensosialisasikan kebijakan untuk menekan laju Covid-19? Apa indiator keberhasilan humas dalam mencapai targer sasaran ?

"publikasi informasi komunikasi subtansi itu (kinerja humas) tidak berubah, namun pelaksanaan program kinerja humas yang berubah, caranya lebih banyak ke virtual. Kalau sebelumnya (Covid) itu ada sih sosialisasi offline atau tatap muka, waktu covid itu di hilangkan, sosialisasi waktu covid itu sekarang (dilakukan secara) Virtual, ya sesuai dengan SE Walikota itu, Selain kita kerjasama dengan wartawan itu kita ada sendiri kita fokuskan kita buat futurial dikasihkan lewat koran-koran tapi semua kegiatan tetep ngundang wartawan. Semua boleh memberitakan, terus ditayangkan di banyak media (seperti) radio TV, itu.. radio lewat dialog interaktif ada, terus kemudian dengan iklan layanan masyarakat, di TATV ada dialog interaktif kemudian sosialisasi lewat media tradisional, kemudian lewat media cetak (koran). Untuk sasarannya itu kan masyarakat Kota Solo, ya Pokoknya

gimana caranya biar masyarakat itu tahu mengenai sosialisasi kita itu. Gimana caranya ya lewat sosialisasi di TV, Radio, sama Instagram yang sudah saya jelaskan tadi"

7. Bagaimana pola komunikasi organisasi yang ada didalam humas pemkot Surakarta dalam satgas Covid-19?

"Sebetulnya kita hanya sebagai *backup*, kalau jamannya Pak Rudy. Pak rudy itu aktif langsung ke masyarakat jadi pak rudy langsung sosialisasi ke masyarakat. Kita cuman backup, biasanya apa yang dikatakan pak rudy di masyarakat kita blowup di media, kayak gitu."

8. Apakah media sosial whatsapp efektif mendukung komunikasi antara staf humas pemkot Surakarta?

"hooh kita punya gurop, kita di prokompim sendiri ada grup, kita dengan media ada grup sendiri juga." Media apa saja yang digunakan humas pemkot dalam menyebarkan informasi kepada public mengenai edukasi covid-19? Berkerja sama dengan stakeholder lain?

9. Apakah humas pemkot Surakarta memiliki straegi khusus untuk membangun saluran komunikasi dengan walikota Surakarta terutama dalam hal penanganan covid-19? Apakah bias dikatakan efektif?

"Jadi semua kegiatan itu kita foto kita video kita bikin release kit ashare kemedia, media tinggal mengolah dengan gaya mereka sendiri kemudian di rilis di media, media tidak boleh memplintir fakta, cuman mereka masih pengen lebih dalam lagi itu biasanya langsung ke paksekda untuk wawancara, dulu malah kita setiap hari kita confrens untuk menginformasikan perkembangan covid itu setiap hari ada. Itu awal-awal seperti itu."

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 3

Hari/Tanggal	20 Juli 2022
Waktu	12.24 WIB
Lokasi	Kantor Prokompim
Informan	Novrian Panji S.I.Kom
Jabatan	Staff Prokompim
Topik	Evaluasi Strategi Komunikasi Humas Dalam Penanganan Covid-19

1. Adakah dokumen tertulis formal maupun non formal yang menjadi landasan dalam merencanakan rancangan kebijakan dalam menekan Covid-19?

"Dokumen tertulis formalnya berbentuk SE (Surat Edaran Walikota), Dokumen walikota seperti SE PPKM, SE KLB (Kondisi Luar Biasa). Saya gak hafal ya, dokumen tertulis itu kayaknya ada di JDIH.Surakarta itu terus searching aja 'Covid' Itu pasti ada."

2. Apakah tupoksi tersebut dijadikan satu-satunya panduan kerja atau humas menyusun program kerja tambahan?

"kalau untuk standar kerjanya humas itu kita tidak hanya dokumentasi sih, itu kita menginformasikan kepada masyarakat, menginformasikan kebijakan dari pemerintah, seperti kebijkannya pak wali, kebijakan yang tersusun dalam SE itu kita sampaikan entah itu dalam bentuk iklan layanan masyarakat atau melalui website atau melalui medsos. Tahun kemarin kita jadi salah satu admin IGnya pemkot Solo cuman untuk tahun ini kan udah dipegang Kominfo"

3. Apakah program kerja yang humas susun tersebut mendukung program kerja pemerintahan dalam menekan covid-19?

"ya tujuan kita sama dengan tujuan Pemerintah Kota Surakarta ya.. istilahnya mendukung tujuan pemerintah kota Surakarta dalam menangani pandemi Covid-19. Kalau dulu pas Pak Rudy masih menjabat ya.. itu ada istilah "DO MANUTO!" itu, kalau waktu Pak Gibran ya tujuan Pemkot kan percepatan Vaksinasi ya.. kita mendukungnya ya dengan menyampaikan kebijakan pimpinan kepada masyarakat Solo"

4. Bagaimana cara humas dalam keikutsertaan menentukan kebijakan untuk menekan laju Covid-19? Apa indicator keberhasilan humas dalam mencapai targer sasaran ?

"ya kita untuk kebijakan sebetulnya, ya humas untuk menginformasikan kebijakan yang sudah ada, kalau yang menyusun kebijakan pasti pimpinan, dari pak sekda, pak wali, pak wakil, satgas Covid itu yang menentukan. Ya cara sebelum melaksanakan Terus untuk indicator keberhasilan humasnya ya intinya informasi yang ingin di sampaikan tercapai ke masyarakat karna saran kebijakan itu masyarakat kota surakarta, ya masyarakat akhirnya tahu oh ternyata Solo sekarang udah PPKM Level 2, level 3 itu bisa kita lihat dari itu sih dimedsoskan misalnya banyak yang Komen itu otomatis banyak yang baca, yang like"

5. Bagaimana pola komunikasi organisasi dalam pelaksanaannya?

"pola organisasi dalam pelaksanaan ya kita rutin mengadakan rakor covid, ya itu salah satu bentuk komunikasi kita untuk wadah rapat menyusun SE PPKM terus kita sampaikan. Ya gitu"

6. Apakah media sosial whatsapp efektif mendukung komunikasi antara staf humas pemkot Surakarta?

"kalau WhatsApp ya kita komunikasinya kan pakai grup ya itu. Pembagian tugas informasi lewat grup. Kita share ke wartawan pun kita pakai grup wa. Semua (Media Partner) ada lewat situ. Jadi kita juga share ke medisos ke media informasi yang kita miliki juga kita share ke media biar media yang memberitakan"

7. Apakah humas pemkot Surakarta pernah melakukan audit/evaluasi mengenai penanganan covid-19? Bagaimana pelaksanaannya?

"audit evaluasi kayaknya bukan humas ya yang melakukan. Audit ya dari satgasnya.

8. Media apa saja yang digunakan humas pemkot dalam menyebarkan informasi kepada public mengenai edukasi covid-19? Berkerja sama dengan stakeholder lain?

"kalau media yang digunakan ya medsos, ya media konvensional juga, media elektronik juga, media cetak juga, sering masang iklan layanan masyarakat itu sih"

Dokumentasi Wawancara



Gambar IV 1 wawancara dengan staff Prokompim, Novriyan Panji, S.I.Kom pada 20 juli 2022, di kantor Protokol dan Komunikasi Pimpinan daerah Kota Surakarta



Gambar IV 2 wawancara dengan Kabag Prokompim periode 2016-2021, Wahyu Kristina, SS. MM. pada 02 Agustusi 2022, di kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta



Gambar IV 3 3 wawancara dengan Kasubag Dokumentasi Prokompim periode 2016-2021, Suroso, S.IP. Pada 20 Juli 2022, di kantor Dinas Sekretariat Daerah Kota Surakarta

Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH

JI. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Telp (0271) 781516 Fax (0271) 782774

Homepage www.lain-surakarta ac.id E-mail fud.uin@iain-surakarta ac.id

Nomor

B- 2173/Un.20/F.I/PP.01.1/06/2022

Surakarta, 30 Juni 2022

Lampiran Perihal

Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Surakarta

Komp. Balaikota, Jalan Jend. Sudirman Kampung baru, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Dr. Islah., M. Ag

NIP

19730522 200312 1 001

Pangkat

Pembina/(IV/a)

Jabatan

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

UIN Raden Mas Said Surakarta

Memohon izin Penelitian bagi mahasiswa kami:

Nama

Salma Ulfa Nafi'ah

NIM Program Studi

181211178 Komunikasi dan Penyiaran Islam

Waktu Penelitian

Lokasi

01 Juli – 17 Agustus 2022 Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda (PROKOMPIM) Kota Surakarta

Judul Penelitian

Evaluasi Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Surakarta Dalam Penanganan Pandemi Covid-19.

Demikian surat ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

ah., M. Ag∯ 19730522 200312 1 001

Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jendral Sudirman No. 2 Telp. (0271) 642020 Telex. 625252 Fax. (0271) 644308 E-mail: setda@surakarta.go.id SURAKARTA 57111

SURAT KETERANGAN

NOMOR: KP.04.00/ 222 /X/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini,

lama : Herwin Tri Nugroho Adi, S.STP, M.H

Jabatan : Kepala Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan

Sekretariat Daerah Kota Surakarta

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Salma Ulfa Nafi'ah

NIM : 181211178

Mahasiswa pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta telah menyelesaikan penelitian mengenai "Evaluasi Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Surakarta dalam Menangani Pandemi Covid-19" di Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 01 Juli 2022 s/d 17 Agustus 2022.

Surakarta, 26 Oktober 2022 SURAKARTA SURAKARTA KEPALA BASIAN PROTOKOL,

KEPALA BAGIAN PROTOKOL,
COMUNIKASTIJAN ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRENI * DAERAH * * DAERA

HERWIN TRI NUGROHO ADI, S.STP, M.H NIP. 198111182000121001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

DATA PRIBADI

Nama : Salma Ulfa Nafi'ah

Tempat, Tanggal Lahir :Surakarta, 04 Desember 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jalan Kencur Selatan I No.8B Pajang, Laweyan,

Surakarta

Status : Mahasiswa Kewarganegaraan : Indonesia

No. HP : 089649796455

Email : salmaulfa12@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2006-2012 : SD Al-Islam 1 Surakarta

2012-2015 : SMP N 1 Surakarta 2015-2018 : SMA N 7 Surakarta

2018-Sekarang : UIN Raden Mas Said Surakarta

RIWAYAT ORGANISASI

Sekretaris Umum Remaja R-BKAM Surakarta (2015-2017)

Sekretaris Umum Karang Taruna Kampung Sogaten (2018-2019)

Sekretaris Umum Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Locus UIN Raden Mas Said (2020)

PENGALAMAN KERJA

Surveyor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta (2022)

Protokol dan Komunikasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta (2021)

Front Service FnB Seoul Korean Food (2022)

Nama Ayah : Medi Luhur Purwanto

Pekerjaan : Bagian Umum SMA Batik 1 Surakarta

Nama Ibu : Sri Widatiningsih

Pekerjaan : Guru Swasta SD Al-Islam 1 Surakarta